

BUKU AJAR

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dilengkapi Dengan Hasil Penelitian Literasi Digital

Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
Aning Fitriana, S.E., M.Ak.

BUKU AJAR PEREKONOMIAN INDONESIA
(Dilengkapi Dengan Hasil Penelitian Literasi Digital)

Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
Aning Fitriana, S.E., M.Ak.



UU No 19 Tahun 2021 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU AJAR PEREKONOMIAN INDONESIA
(Dilengkapi Dengan Hasil Penelitian Literasi Digital)

Penulis:

Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.

Aning Fitriana, S.E., M.Ak.

Editor:

Suwali, M.Si.

Desain Sampul:

Tiga Cakrawala

Hak Cipta 2023, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tiga Cakrawala

Cetakan: I, Januari 2023

Tebal: 14 x 21 cm, vii + 211 Halaman

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang kerang menerjemahkan, memfotokopi,
atau memperbanyak sebagian datu seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

TIGA CAKRAWALA

Jl. Teri RT 01 RW 05 Kelurahan Widuri
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Telp: 085727709371

Email : tigacakrawala.id@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku Ajar yang berjudul “BUKU AJAR PEREKONOMIAN INDONESIA (Dilengkapi Dengan Hasil Penelitian Literasi Digital)”.

Buku ini masih dalam garis besar, atau belum rinci. Oleh karena itu mahasiswa maupun masyarakat umum diharapkan tidak merasa puas setelah membaca dan belajar dari buku ini, melainkan buku ini sebagai pijakan untuk mempelajari perekonomian Indonesia sebagai dasar konsep dan teori.

Penulis menyadari apabila dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat. Akhir kata guna penyempurnaan buku ini, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis nantikan.

Purbalingga, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1. Karakteristik dan Kondisi Perekonomian Indonesia	1
A. Karakteristik dan Kondisi	1
B. Ruang Lingkup.....	11
BAB 2. Sejarah Perekonomian Indonesi	14
A. Perekonomian Indonesia Dari Masa ke Masa	14
B. Prospek Perekonomian Indonesia	49
BAB 3. Sistem Perekonomian Indonesia	53
A. Pendahuluan.....	53
B. Macam-macam Sistem Ekonomi	53
C. Sistem Perekonomian Indonesia	58
BAB 4. Pendapatan Nasional, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Indonesia.....	68
A. Pendapatan Nasional.....	68
B. Pertumbuhan Ekonomi.....	83
C. Struktur Ekonomi.....	85
BAB 5. Dstribusi Pendapatan dan Kemiskinan	89
A. Kinerja Perekonomian Indonesia	89
B. Disparitas Distribusi Pendapatan di Indonesia	97
C. Profil Kemiskinan di Indonesia	100
D. Platform Kebijakan Pengentasan Kemiskinan ke Depan	106
BAB 6. Kependudukan, Ketenagakerjaan, Kesempatan Kerja, Pengangguran	119
A. Pengertian Kependudukan	120

B. Tujuan dan Kegunaan Ilmu Kependudukan	123
C. Sejarah Pertumbuhan Penduduk Didunia Dan Indonesia	125
D. Pengertian Ketenagakerjaan.....	127
E. Peran UU Terhadap Ketenagakerjaan.....	128
F. Pengertian Kesempatan Kerja.....	129
G. Kaitannya Kesempatan Kerja Dengan Pengangguran.....	130
H. Pengertian Pengangguran.....	132
BAB 7. Indeks Pembangunan Manusia	134
A. Pendahuluan.....	134
B. Perkembangan Model Pembangunan Di Indonesia.....	136
C. IPM Untuk Perencanaan Pembangunan..	141
D. Fungsi dan Keterbatasan	144
BAB 8. Investasi	147
A. Pendahuluan.....	147
B. Jenis-Jenis Investasi	151
C. Resiko Dalam Investasi.....	155
BAB 9. Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Dan Pengeluaran Pemerintah	160
A. Pengeluaran Konsumsi Masyarakat	160
B. Pengeluaran Pemerintah.....	168
BAB 10. Perdagangan Luar Negeri.....	175
A. Pendahuluan.....	175
B. Proteksi Dan Pembatasan Perdagangan ..	179
C. Globalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi	181
BAB 11. Neraca Pembayaran, Arus Modal Asing, Dan Utang Luar Negeri	184
A. Neraca Pembayaran	184
B. Arus Modal Masuk	185

BAB 12. Literasi Digital	193
DAFTAR PUSTAKA.....	205
GLOSARIUM	207
RIWAYAT PENULIS	209



BAB 1. KARAKTERISTIK DAN KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA

Tujuan dari bab karakteristik dan kondisi perekonomian indonesia ini adalah agar mahasiswa memahami pendahuluan dari karakteristik dan kondisi perekonomian indonesia.

A. Karakteristik dan Kondisi

Kondisi perekonomian Indonesia sangat tergantung dengan daya dukungnya. Daya dukung ini terdiri dari beberapa variabel yang mempengaruhinya. Variabel inipun juga tidak serta merta dapat memberikan kontribusi kepada kondisi perekonomian Indonesia, namun masih ditentukan oleh karakteristik dari variabel tersebut. Dengan demikian, untuk melihat kondisi perekonomian Indonesia, maka relevan diuraikan tentang karakteristik yang melingkupinya.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ciri-ciri spesifik, yang berbeda dengan negara-negara lain di dunia, sehingga perekonomiannya tentu saja memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda pula dengan negara-negara lain.

Karakteristik menunjukkan ciri yang mendasari dari sebuah objek. Adapun karakteristik perekonomian Indonesia, dipengaruhi oleh: 1) Faktor Geografi, 2) Faktor Demografi, 3) Faktor Sosial, Budaya dan Politik.

Faktor Geografi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.667 pulau besar/kecil yang terbentang dari 60°LU sampai 110°LS sepanjang kurang lebih 61.146 km. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km², 70 persennnya terdiri dari lautan. Letaknya strategis, karena berada pada posisi silang (antara Benua Asia dan Benua Australia), dan menjadi jalur lalu lintas dunia (antara laut Atlantik dan Laut Pasifik). Kondisi ini menimbulkan kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau, ketidaklancaran mobilitas barang, perbedaan harga barang, perbedaan kesempatan pendidikan, dan kesempatan kerja yang semuanya bermuara pada kesenjangan. Menurut Sutjipto (1975), Indonesia dalam sektor ekonomi terjadi perbedaan potensi ekonomi karena perbedaan

sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kesuburan tanah, dan curah hujan.

Faktor Demografi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 tercatat sebanyak 237.641.326 jiwa. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang berada di urutan ke 3 di dunia sebagai negara berpenduduk besar. Penyebaran penduduk tidak merata (2/3nya tinggal di Pulau Jawa). Sebagian besar hidup di pedesaan (pertanian), bermata pencaharian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah sangat rendah. Sektor tenaga kerja masih didominasi jenjang pendidikan SD kebawah yaitu sebesar 54,2 juta orang (49,40%), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sekitar 3,2 juta orang (2,89%) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 5,6 juta orang (5,15%). Hal itu menunjukkan bahwa mutu SDM masih rendah, yang berdampak pada rendahnya produktivitas. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar, maka Indonesia membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup. Namun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak sebanding

dengan kemampuan memproduksi. Hal ini memicu munculnya kondisi rawan kemiskinan.

Faktor Sosial, Budaya, dan Politik. Aspek sosial ditunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan keragaman adat, budaya, dan tradisi. Hal ini tentu saja membuka potensi perbedaan dalam persepsi terhadap persoalan yang ada, yang berpotensi menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Aspek budaya ditunjukkan adanya pengaruh feodalisme dan pengaruh kolonialisme yang masih ada hingga sekarang ini. Hal ini terasa pada medan perpolitikan di Indonesia. Perilaku yang kurang demokrasi dari para elit politik dan para penguasa, menghambat kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Dalam bidang politik, warisan kehidupan kerajaan yang membentuk feodalisme masih kental dalam kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari tataran pusat hingga daerah. Kesemuanya itu akhirnya menghambat terciptanya demokrasi ekonomi.

Berbasis karakteristik di atas, maka tentu saja kondisi perekonomian Indonesia masih membutuhkan perhatian dari penyelenggara negara. Kondisi perekonomian suatu negara menjadi target bagi kondisi secara umum suatu negara pula. Negara yang secara formalnya dijalankan oleh kekuasaan melalui sistem birokrasinya, tentu mengharapkan kondisi perekonomian yang dapat memberikan kemakmuran bagi penduduknya. Kegagalan negara dalam mengelola perekonomiannya dapat menjadi pemicu bagi munculnya persoalan pelik dan akan menyeret negara tersebut dalam pusaran ketidakpastian. Ketidakpastian yang tidak bisa dikendalikan menjadi pembuka munculnya kegagalan negara.

Kegagalan negara dalam manajemen tata penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sedikit-tidaknya telah dicermati oleh beberapa ahli, diantaranya: Kruger (1990), Weimer dan Vining (1992), Malpas dan Wickam (1996), Mangkusubroto (1999). Kruger (1990) mengemukakan proporsi tentang kegagalan pemerintah dalam pembangunan.

Pertama, orang akan menghabiskan sumber daya untuk menangkap hak milik pemerintah. Kedua, kelompok-kelompok akan mempertahankan posisi yang telah diraihinya. Ketiga, ada kepentingan yang berbeda dalam pemerintahan. Weimer dan Vining (1992) menyebutkan bahwa kegagalan pemerintah merupakan persoalan yang inheren dalam empat sosok sistem politik, yaitu: demokrasi langsung, keterwakilan pemerintahan, penawaran birokrasi, dan desentralisasi pemerintahan. Malpas dan Wickam (1996) berpendapat bahwa kegagalan pemerintah dapat disebabkan tindakan kurang pengetahuan tentang gabungan kausal yang mempengaruhi objek pemerintahan, kemungkinan keterlibatan masalah dalam pembelajaran strategis, masalah koordinasi *interpersonal-interorganisasional-intersistemic*, masalah kestabilan harapan antara berbagai aktor yang terlibat dalam pemerintahan dan *metagovernance* sebagai landasan tindakan bersama. Menurut Mangkusubroto (1990), kegagalan pemerintah disebabkan oleh empat hal, yaitu: 1) Informasi yang

terbatas, 2) Pengawasan yang terbatas atas reaksi publik swasta, 3) Pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat, 4) Hambatan dalam proses politik.

Pendapat keempat ahli di atas, jelas menegaskan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan bukan sekedar menjadi ajang bagi birokrasi melakukan eksperimen dalam menyelenggarakan praktik manajemen pemerintahan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintahan berjalan optimal dengan berbagai dukungan sistem yang ada, untuk mencapai hasil optimal berupa output bagi kesejahteraan penduduk dan kemakmuran negara.

Kemakmuran, kata yang selalu didengungkan oleh perencanaan pembangunan sebagai tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan. Untuk mencapai kemakmuran bukan pekerjaan yang mudah. Terdapat kondisi yang harus dihadapi oleh perencana pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran. Kondisi tersebut dikenal dengan sebutan lingkaran setan kemiskinan, berupa pusaran yang tak berujung pangkal, terkait dengan

keterbelakangam, kekurangan modal, rendah produktivitas, rendahnya pendapatan, rendahnya tabungan, dan rendahnya investasi (Nurkse, 1953).

Kemakmuran negara dan kesejahteraan penduduk jelas menjadi representasi dari kondisi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kondisi perekonomian suatu negara sudah selayaknya menjadi bagian yang harus diperhatikan dan dicermati penyelenggara negara. Jika kita melacak lebih jauh tentang kondisi perekonomian Indonesia, maka untuk mengetahuinya tentu harus dilacak pula beberapa fakta yang terjadi, dan ini hanya bisa kita ketahui melalui beberapa rekaman dari beberapa referensi yang telah mejadi fakta publik.

Beberapa publikasi terkait kondisi perekonomian Indonesia relevan untuk diungkapkan. Kondisi perekonomian Indonesia dalam perkembangan sampai dengan saat ini merupakan gambaran dari suatu proses panjang yang mencerminkan indikator efektivitas kinerja pemerintahan dibawah nahkoda presiden beserta kabinetnya. Paling tidak terdapat aspek

pertumbuhan dan pemerataan pendapatan, perbankan, produk domestik bruto, rasio utang, inflasi, lapangan kerja dan pengangguran.

Optimisme perekonomian Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional yang semakin meningkat. Hal itu mampu memberikan kemajuan ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Di sektor perbankan Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan I-2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni di kisaran 6,4%, sehingga sepanjang tahun ini, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 6-6,5%.

Menurut Kuncoro (2007), pertumbuhan ekonomi Indonesia bercirikan *consumtion driven growth* dibandingkan *investment led growth*. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan, dibandingkan hasil dari manfaat pembangunan dan keberhasilan pertumbuhan

ekonomi khususnya pada sektor-sektor lain yang masih rendah, serta pembangunan seperti pada Kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal. Pertumbuhan ekonomi masih jauh dari berkualitas karena kecenderungan masih adanya indikasi *trickle up effect* dalam proses pembangunan dimana terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.

Tidak meratanya kondisi infrastruktur, sedikit banyak memberikan kontribusi terjadinya ketimpangan pendapatan. Padahal dinamika aktivitas perekonomian perlu dukungan infrastruktur yang baik. Selain itu, model prioritas pembangunan fisik yang mempertimbangkan distribusi antar wilayah, tentu perlu diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar kesenjangan perekonomian antar daerah dapat dikurangi. Tidak dipungkiri, bahwa fakta selama ini menunjukkan kondisi infrastruktur di luar Pulau Jawa masih tertinggal dibandingkan dengan Pulau Jawa. Hal ini akibat adanya konsentrasi pembangunan yang terfokus di wilayah Barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa.

Peluang Indonesia untuk tumbuh luar biasa besar, bisa mencapai 7% rata-rata sampai 2016, investasi juga besar, struktur demografi yang sehat, dan meningkatnya penduduk berpendapatan menengah (Damyanti, 2012). Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan cukup cerah karena berbagai faktor positif baik internal maupun eksternal sangat mendukung melalui investasi asing yang semula hanya dalam jangka pendek domestik yang makin bagus (Kurniawan, 2012). Pertumbuhan ekonomi meningkat, surplus neraca pembayaran masih besar, peran intermediasi perbankan membaik, dan inflasi dapat diarahkan pada kisaran sasarannya. Dalam jangka menengah pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat dengan inflasi yang semakin rendah.

B. Ruang Lingkup

Mengacu pada argumentasi tersebut, nampak bahwa ekonomi Indonesia masih membutuhkan sentuhan bagi tercapainya kondisi ideal perekonomian berupa kemakmuran, yang nantinya

dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia secara proporsional.

Seiiring berjalannya waktu, berbagai kebijakan pembangunan ekonomi telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan harapan pada tercapainya hasil yang optimal bagi Bangsa Indonesia. Namun fakta juga tidak bisa dibantah, bahwa masih menumpuk persoalan yang semestinya untuk ditangani. Secara garis besar, buku ini mencoba mengurai fakta perekonomian Indonesia berdasarkan ruang lingkup.

Ruang lingkup perekonomian Indonesia dalam buku ini membahas perekonomian Indonesia secara umum mencakup konsepsi teori perekonomian Indonesia secara umum mencakup konsepsi teori terkait perekonomian, dan sisi historis perjalanan perekonomian Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan bahasan yang lebih spesifik terkait persoalan nyata, seperti pertumbuhan ekonomi, produk nasional, kependudukan, perdagangan internasional. Tidak ketinggalan

bahasan tentang isu sektoral mencakup industry, jasa, pertanian, ekspor, impor, dan kewirausahaan.



BAB 2. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Tujuan dari bab sejarah perekonomian Indonesia ini adalah agar mahasiswa memahami pengertian dan dasar sejarah perekonomian Indonesia.

A. PEREKONOMIA INDONESIA DARI MASA KE MASA

Melihat dinamika perjalanan perekonomian Indonesia, maka pendekatan historis layak dikedepankan. Pendekatan ini tentu saja sejalan dengan rekap jejak perjalanan Bangsa Indonesia. Dengan demikian, aspek sejarah Indonesia sedikit banyak menjadi acuan bagi derap langkah perjalanan perekonomian Indonesia.

1. Masa sebelum penjajahan (Sebelum tahun 1600)

Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari jaman pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia, yaitu ketika Portugis masuk ke Indonesia (Maluku) pada abad 16. Atas dasar hal itu, maka dinamika

perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di nusantara. Beberapa kerajaan dalam perjalanan sejarah kehidupan Bangsa Indonesia di antaranya adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuna, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sunda, Kerajaan bali (Listiani, 2009). Posisi geografis dimana pusat kerajaan berada ternyata beragam. Ada yang dipesisir pantai, ada yang di tepi laut. Hal itu berakibat pada keragaman corak aktivitas perekonomiannya.

Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian utama, sehingga rakyat Kutai sudah mengenal perdagangan Internasional. Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris, sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan

peternakan. Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan berada pada urat nadi perdagangan di Asia Tenggara sehingga masyarakat Sriwijaya menguasai perdagangan.

Kerajaan Mataram berada di bagian tengah Pulau Jawa. Posisi ini membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor pertanian. Namun karena kondisi bumi Mataram tertutup dari dunia luar berakibat pada sulitnya untuk mengembangkan aktivitas perekonomian. Beberapa kerajaan yang berada di Jawa bagian Timur, juga menandakan aktivitasnya. Kehidupan ekonomi masyarakat pada jaman Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan.

Kerajaan Sunda berfokus pada kegiatan perdagangan dan pertanian yang merupakan kegiatan mayoritas rakyat Sunda. Selain Bertani, kehidupan masyarakat kerajaan Sunda juga berdagang. Kehidupan perekonomian

masyarakat Kerajaan Bali Kuno bertumpu pada pertanian. Beberapa istilah yang berkaitan dengan bercocok tanam, anatara lain sawah, parlak (sawah kering), gaga (ladang), kebwan (kebun), dan kasuwakan (irigasi). Selain bercocok tanam, ada yang beberapa bekerja sektor di kerajinan.

Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Munculnya sektor perdagangan dalam aktivitas masyarakat pada jaman tersebut, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya berbasis pada sektor primer saja. Dengan demikian, cikal bakal sektor perekonomian yang lebih baik, sebenarnya telah dimulai pada masa tersebut.

2. Masa Penjajahan Portugis (1509-1659)

Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis

merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan yang sekarang rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma. Upaya pertama Portugis untuk menguasai kepulauan Indonesia adalah dengan menyambut tawaran kerjasama dari Kerajaan Sunda.

Bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan ekspedisi dan ekspansi jauh ke negara-negara di dunia. Selain itu, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi negaranya. Hal ini membuat perdagangan menjadi fokus bagi Portugis untuk membangun perekonomian. Banyak perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia dilakukan untuk mendapatkan komoditi perdagangan rempah-rempah.

Masa penjajahan Portugis memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-rempah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia berada dalam bayang-bayang Portugis. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari eksploitasi Portugis.

3. Masa Penjajahan Belanda (1602-1942)

Belanda masuk ke Indonesia kira-kira pada tahun 1602. Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi

menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur.

Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih selama 350 tahun, atau 3,5 abad. Masa yang sangat Panjang bagi Bangsa Indonesia dalam cengkeraman Belanda. Dalam rentang waktu tersebut berbagai kebijakan ekonomi dilakukan oleh Belanda. Dibentuknya **Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)** adalah salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. Dengan VOC tersebut segala otoritas perdagangan dikuasi Belanda.

VOC benar-benar dibuat dalam rangka menguasai perdagangan, sehingga beberapa kewenangan dimilikinya, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat Angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Di sini terlihat betapa VOC mempunyai kekuasaan yang besar. Kewenangan itu seolah melegalkan

keberadaan VOC sebagai penguasa Hindia Belanda.

Pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia). Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh : 1) Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, 2) Penggunaan tantara sewaan membutuhkan biaya besar, 3) Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri, 4) Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas deficit. Bubarnya VOC bukan berarti Belanda kehilangan akal untuk mempertahankan dominasi penjajahannya. Justru muncul kebijakan baru yang disebut dengan *cultuur stelsel* (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch.

Sistem tanam paksa berlangsung melalui aturan yang keras dan ketat. Tidak jarang masyarakat pribumi harus memeras keringat

bahkan dengan cucuran darah mereka. Anehnya sistem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang ada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan pula membangkitkan perekonomian desa.

Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian Belanda menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan karena desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan munculnya beberapa peraturan-peraturan, seperti peraturan yang mengatur tentang sewa tanah, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan atau tidak. Kelihatannya sistem ini baik, namun tetap saja menambah penderitaan bangsa Indonesia, terutama para tenaga kerja rendahan (kuli).

4. Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Kronologi penjajahan Jepang di Indonesia diawali pada bulan Juli 1942. Saat itu, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye public dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai memperoleh penghormatan dan Kaisar Jepang pada tahun 1943. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia Belanda sebelum perang. Perjalanan waktu terus berputar, sehingga pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke

Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Kebijakan ekonomi pada jaman penjajagan Jepang, terdiri atas; 1) Perluasan Areal Persawahan, 2) Pengawasan Pertanian dan Perkebunan.

Perluasan Areal Persawahan. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus menurun.

Pengawasan Pertanian dan Perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada

pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani masalah Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang berani melakukan pelanggaran disebut Kempetai (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat.

Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secara Ketat. Jepang hanya mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan Repentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Padahal, ketiga jenis tanaman itu sangat laku di pasaran dunia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi sangat merugikan rakyat.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan

kehidupan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan penuh penderitaan. Kondisi rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang, jika dibandingkan dengan kondisi rakyat Indonesia ketika dijajah Belanda malah lebih buruk. Padahal Jepang menduduki Indonesia hanya tiga setengah tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad.

5. Masa Order Lama (1945-1967)

Dinamika perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama menarik untuk dicermati. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut, Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka. Ibaratnya, sebagai negara yang baru merdeka maka berbagai fenomena muncul seiring dengan berlangsungnya kehidupan politik yang berlangsung pada saat itu. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu: 1). Masa Kemerdekaan (1945-1950), 2). Masa Demokrasi Liberal (1950-1957), 3). Masa Demokrasi Terpimpin.

a. Masa Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Bulan Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Akibatnya negara berada dalam kondisi krisis keuangan. Kondisi tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada masa itu.

Menghadapi krisis tersebut, tidak ada jalan lain bagi pemerintah, kecuali harus segera menempuh beberapa kebijakan, yaitu pinjaman nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, melakukan konferensi ekonomi, membuat rencana pembangunan,

membangun partisipasi swasta dalam pembangunan ekonomi, dan nasionalisasi Bank Indonesia.

Pinjaman Nasional dilakukan oleh Menteri keuangan (kalah itu Ir. Soerachman) dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan negara. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dilakukan dengan mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat.

Pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan distribusi bahan makanan, sandang, serta status administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi ekonomi. Kemudian untuk melengkapinya dibuat Rencana Lima

Tahunan (Kasimo Plan), dimana dalam dokumen itu meliputi anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra dan mengadakan transmigrasi.

Pada masa tersebut, pemerintah telah menyadari bahwa jika hanya pemerintah sendiri yang bekerja, maka pekerjaan pemerintah akan menjadi lebih berat. Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng swasta dalam membangun perekonomian, dengan mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan dengan Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia, yang hingga sekarang ini menjadi Bank Indonesia.

Selain kebijakan di atas, muncul pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi Ali-Baba.

Sistem Ekonomi Gerakan Banteng merupakan kebijakan yang digagas oleh Soemitro Djojohadikusumo". Sistem ini dimaksudkan untuk perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonomi. Tujuannya melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan non pribumi. Setelah kabinet Natsir jatuh, sistem ini dilanjutkan oleh Kabinet Sukiman melalui menteri keuangannya Jusuf Wibisono dengan kebijakannya pemberian kredit pada pengusaha pribumi. Namun kebijakan ini akhirnya gagal. Sistem Ekonomi Ali Baba merupakan penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan

memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sistem ini berlaku pada kabinet Ali Sastroamijoyo-l.

Kondisi perekonomian pada masa ini lebih banyak berfokus pada bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi dasar. Namun hal inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik, akibat situasi politik yang tidak stabil. Beberapa kebijakan sebenarnya telah didisain dengan baik, namun ketika diimplementasikan tidak jalan. Tentu saja tidak bisa memperbaiki kondisi perekonomian pada masa itu.

b. Masa Demokrasi Liberal (1959-1957)

Masa ini, paham liberaslisme mulai masuk dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya cabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Hal ini kemudian membuat pada masa ini perekomian diserahkan sepenuhnya pada pasar. Kebijakan ini sebenarnya belum tepat benar, karena pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun akibat pengaruh eksternal, masa kebijakan ini tetap berjalan. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Pada masa itu pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian. Anehnya pemerinyah juga sudah mengetahui dampaknya, maka pemerintah juga melakukan berbagai upaya

untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, agar tingkat harga turun. Program ini dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribadi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Serta pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Demokrasi terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi si pemimpin.

Pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin muncul pertama kali pada pidato yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi (1959). Dalam pidatonya tersebut Soekarno menyatakan bahwa kita dapat menggunakan sistem yang sudah-sudah dan alat-alat yang sudah-sudah. Sistem Liberalisme harus dibuang jauh-jauh, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin harus ditempatkan sebagai gantinya.

Akhirnya demokrasi terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Konsekuensi dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui sistem etatisme, dimana dalam sistem ini negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan

serta memastikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

Masa ini tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik, justru berdampak pada adanya devaluasi, perlunya membentuk Lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Devaluasi berarti menurunkan nilai uang. Tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Pada saat itu mata uang Rp 1.000,00 dan Rp 1.500,00 menjadi Rp 50,00. Pada saat itu dibentuk pula apa yang disebut dengan Deklarasi Ekonomi, yang bertujuan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

6. Masa Orde Baru (1967-2008)

Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Suharto. Pada masa ini

dikenal dengan beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Namun proses perjalanan Orde Baru juga penuh dengan dinamika, sehingga kondisi perjalanan perekonomian juga seiring dengannya.

Order baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada otoritas stabilitas ekonomi dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Berkaca pada masa sebelumnya, dimana ketika sistem ekonomi liberal diterapkan ternyata berdampak pada kegagalan pengusaha pribumi dalam bersaing dengan pengusaha non pribumi, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi Pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk. Nampak ajaran Keynes mulai merasuki pemikiran pengambil kebijakan Negara.

Pentingnya aspek pemerataan, tampaknya disadari betul dalam masa itu, sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya. Kedelapan jalur tersebut adalah: 1) Kebutuhan pokok, 2) Pendidikan dan kesehatan, 3) Pembagian pendapatan, 4) Kesempatan kerja, 5) Kesempatan berusaha, 6) Partisipasi wanita dan generasi muda, 7) Penyebaran pembangunan, 8) Peradilan.

Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sektor industri. Selain itu, terdapat pula keberhasilan dalam mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).

Akan tetapi, apa yang telah menjadi capaian di atas, ternyata muncul sisi negatif

yang menjadi fakta untuk dicermati. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan sumber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, serta akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk. Muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meskipun Order Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Hal ini terbukti, ketika dunia dilanda krisis global pada tahun 1998, Indonesia merasakan dampak yang luar biasa. Harga-harga meningkat secara drastis dan sulit dikendalikan, rupiah tidak berharga dalam perdagangan internasional, dan banyak perusahaan berskala besar bangkrut. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru, akhirnya berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

7. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Masa Reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial dan politik. Pada masa ini muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dan yang semua sentralistik, menjadi desentralistik. Kebijakan dengan Otonomi daerah, yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004.

a. Masa Presiden BJ. Habibie (21 Mei 1998 s/d 20 Oktober 1999)

Habibie adalah Wakil Presiden ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden ke-tujuh. Namun ketika Soeharto lengser konstitusi Habibie yang menggantikannya. Habibie inilah boleh dikata sebagai awal Orde Reformasi, meski masih sebagai bagian dari Soeharto. Perdebatan tentang

siapa sebenarnya yang mengawali reformasi masih ada hingga sekarang. Namun jika kita mengaca pada perjalanan sejarah awal bergulirnya reformasi, Nampak bahwa reformasi yang dimaksud adalah lengsernya SPeharto dari kursi presiden. Nah ketika Soeharto telah benar-benar turun, maka tentu saja penggantinya layak disebut sebagai pemimpin baru yang reformis.

Habibie mewarisi kondisi kekacauan pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa Order Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusakan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi.

Habibie melakukan beberapa kebijakan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun keamanan, di bidang ekonomi, Habibie berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar dalam kisaran antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerinyahannya terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada lebel Rp 6.500 perdolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian.

b. Masa Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur (20 Oktober 1999 s/d 23 Juli 2001)

Perekonomian kala itu buruh perhatian serius dalam penangannya, salah satunya sektor moneter. Menyadari berapa beratnya mengelola sektor moneter, maka untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan

Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi Nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indrawati. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abudraahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indoensia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
- 2) Hubungan pemerintahan dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.

23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.

- 3) Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal Indonesia
- 4) Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

**c. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri
(23 Juli 2001 s/d 20 Oktober 2004)**

Pemerintah Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus

Dur. Hal itu ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif, dan indeks harga saham gabungan yang cenderung menurun.

Salah satu masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan yang dilakukan adalah meminta penundaan utang sebesar US\$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 Trilliun. Megawati juga berhasil memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US\$ 57,158 miliar dan import tercatat US\$ 31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak ke angka US\$61,02 miliar dan import meningkat ke angka US\$32,39 miliar. Untuk krisis moneter, Megawati

berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US\$ 930, dan menurunkan kurs mata uang rupiah menjadi Rp 8.500,00. Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan. Pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,1%, karena pada saat itu pemerintah membuat kebijakan privatisasi BUMN, yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual kepada perusahaan asing.

d. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 s/d 2014)

Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal dengan sebutan SBY,

merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Periode pertama dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, sedangkan pada periode kedua dilantik pada 20 Oktober 2009 dengan Wakil Presiden Boediono. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Terdapat dua kebijakan yang dianggap kontroversial, yaitu : 1) Kebijakan mengurangi subsidi BBM, 2) Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan mengurangi subsidi BBM, dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor Pendidikan dan kesehatan,

serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara kebijakan BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.

Perkembangan dalam sektor utang luar negeri juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dollar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Dengan sudah tidak berada dalam “cengkeraman” IMF, maka Indonesia akan lebih leluasa dalam menentukan kebijakannya.

Masa ini juga ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2005 pertumbuhan

ekonomi sebesar 6,4%, angka mendekati target 6,6%. Namun, tingkat inflasi mencapai 8,7% yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005, dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 2005. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%.

Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Masih ada kebijakan-kebijakan

lain dalam bidang ekonomi, seperti: pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB, pembelian kembali saham BUMN, pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil, memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008, pemberian bibit unggul pada petani.

Era SBY meninggalkan beberapa masalah yaitu implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya, karena tidak (atau barangkali belum) muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pengangguran dan kemiskinan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan.

B. Prospek Perekonomian Indonesia

Melihat rekaman kondisi perekonomian tersebut, kita tentu bertanya, bagaimana prospek perekonomian Indonesia kedepan?, pertanyaan ini

muncul di tengah situasi ekonomi dunia yang masih belum stabil.

Menurut Ratnawaty (2012)²⁶, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan diuntungkan oleh konsumsi domestik yang cukup besar. Dalam sektor investasi, menurut Wirjawan (2010)⁷, prospek pertumbuhan investasi Indonesia pada 2010 dinilai cukup positif, karena Indonesia akan menerapkan kebijakan yang memudahkan dan memberikan kenyamanan investor dalam melakukan investasi. Hal senada disampaikan oleh Dapice (2012)", prospek perekonomian Indonesia dinilai masih yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, persentase investasi asing terhadap PDB Indonesia paling kecil, yakni hanya sekitar 7 persen. Vietnam mendekati 10 persen, Thailand 12 persen, serta Malaysia dan Filipina di atas 15 persen. Investasi asing karena Tangsung dan portofolio kapital sangat membantu pertumbuhan negara-negara ASEAN. Tapi, saat krisis seperti arus investasl langsung akan melambat.

Kondisi moneter dan beberapa sektoral Indonesia juga menjadi modal perekonomian. Menurut Juoro dan Sugema (2011)", hal ini terlihat dari stabilitas ekonomi terjaga baik dalam jangka menengah, inflasi rendah, suku bunga dapat diturunkan, dan nilai rupiah cenderung menguat. Pada perekonomian jangka menengah secara sektoral pertumbuhan tinggi pada sektor non-traded seperti telekomunikasi, perumahan, dan keuangan. Sementara, sektor traded seperti industri manufaktur, pertanian, dan pertambangan butuh revitalisasi.

Bab ini menuntun kita untuk menyadari bahwa waktu dapat mempengaruhi perjalanan kondisi perekonomian. Perjalanan waktu yang diiringi dengan perubahan dinamika, baik sosial dan politik, ternyata memberikan kontribusi pada kebijakan yang dihasilkan pada periode masing-masing pemerintah. Ada kesan belum ada keberlanjutan secara menyeluruh terhadap kebijakan dari periode pemerintahan sebelumnya. Namun di tengah realita seperti terurai di bab ini, ternyata

Indonesia masih mempunyai harapan terhadap kondisi perekonomian. Prospek ekonomi Indonesia ternyata didukung oleh kondisi yang signifikan, baik dari sisi mikro dan makro, serta sektoral, Hal ini membawa optimisme bagi perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik.



BAB 3. SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Tujuan dari bab sistem perekonomian indonesia ini adalah agar mahasiswa memahami pengertian dan peran dari sistem perekonomian indonesia.

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi/falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, serta struktur ekonomi.

B. Macam-Macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis/Pasar

Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu

melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal:

- a. Adanya pengakuan terhadap hak individu
- b. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
- c. Menerapkan sistem persaingan bebas
- d. Peranan modal sangat penting
- e. Peranan pemerintah dibatasi
- f. Motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu

Kelebihan sistem ekonomi liberal:

- a. Setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri
- b. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri
- c. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan
- d. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
- e. Kualitas barang lebih terjamin
- f. Kualitas pelayanan terjamin

Kelemahan sistem ekonomi liberal:

- a. Menimbulkan monopoli
- b. Terjadi kesenjangan
- c. Rentan terhadap krisis ekonomi
- d. Adanya eksploitasi
- e. Tindakan yang kurang sehat dalam persaingan

2. Sistem Ekonomi Sosialis/Komando/Terpusat

Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis.

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis:

- a. Hak milik individu tidak diakui
- b. Seluruh sumber daya dikuasai negara
- c. Jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah
- d. Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah

- e. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
- f. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah

Kelebihan sistem ekonomi sosialis:

- a. Pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian
- b. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat
- c. Pemerintah mengatur distribusi
- d. Mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan
- e. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat
- f. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata

Kelemahan sistem ekonomi sosialis:

- a. Hak milik individu tidak diakui
- b. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha
- c. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang
- d. Jalur birokrasi Panjang

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran:

- a. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta
- b. Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih ada campur tangan pemerintah
- c. Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah

Kelebihan sistem ekonomi campuran:

- a. Kestabilan ekonomi terjamin
- b. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil

- c. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu
- d. Hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan
- e. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi

Kelemahan sistem ekonomi campuran:

- a. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta
- b. Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta

C. Sistem Perekonomian Indonesia

1. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya

mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi. Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakitilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

2. Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan Demokrasi Pancasila

Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD'45, sistem

perekonomian pancasila tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah.

Ciri-ciri utama sistem ekonomi Indonesia:

- a. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.
- b. Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia dengan ciri-ciri positif Demokrasi Pancasila dipilih, karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :
 - 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- 3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
- 5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- 7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

- 8) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima ciri utama sistem ekonomi Pancasila yaitu:

- a. Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta.
- b. Manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial.
- c. Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan sosial.
- d. Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.
- e. Pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

3. Sistem Perekonomian Indonesia sangat Menentang adanya sistem Free fight liberalism, Etatisme, dan Monopoli

Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya:

- a. Free fight liberalism ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin.
- b. Etatisme yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
- c. Monopoli suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’ Pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia.

Awal tahun 1950-an - tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an - masa orde baru. Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 - tahun 1965-an sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:

- 1) Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi.
- 2) Program/ Sumitro Plan tahun 1951.
- 3) Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960

Namun demikian ke semua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia.

Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:

- a. Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik lebih dominan, seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerah-daerah, dan masalah politik sejenisnya.
- b. Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
- c. Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercatat tidak

kurang dari 13 kabinet berganti saat itu. Akibatnya program dan rencana yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas, kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.

- d. Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping putusan individu/ pribadi, dan partai lebih dominan daripada kepentingan pemerintah dan negara.
- e. Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis, 1950 – 1957) dan etatisme (1958 – 1965).

Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah ‘terjadi’ di Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukti-bukti berikut:

- a. Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor kita.
- b. Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek 'Mercuri Suar'.
- c. Defisit anggaran negara yang makin besar, dan justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah kembali. Keadaan tersebut masih dipaparkan dengan laju pertumbuhan penduduk (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni sebesar 2,2%.

BAB 4. PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN, DAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

Tujuan dari bab Pendapatan Nasional, Pertumbuhan, Dan Struktur Ekonomi Indonesia ini adalah agar mahasiswa memahami Pendapatan Nasional, Pertumbuhan, Dan Struktur Ekonomi Indonesia.

A. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara (Sukirno, 2008, p36). Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, dimana Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2008, hal: 36). Meskipun demikian, pendapatan Nasional secara spesifik merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam tahun tertentu (Sukirno Sadono, 2008: 36). Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional, antara lain:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (*Gross Domestic Product*) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor atau disebut juga dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode (Mankiw, 2006, hal : 6), meliputi faktor produksi milik warga negaranya sendiri maupun milik warga negara asing yang melakukan produksi di dalam negara tersebut.

b. Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut atau disebut juga dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut, termasuk nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi yang digunakan di luar negeri, namun tidak menghitung produksi yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan di dalam negara tersebut (Sukirno, 2008, hal : 35).

RUMUS untuk menghitung GNP

$$\text{GNP} = \text{GDP} - \text{Produk netto terhadap luar negeri}$$

c. Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (*Net National Product*) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut *replacement*). *Replacement* adalah penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

RUMUS menghitung NNP

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Penyusutan}$$

d. Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (*Net National Income*) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan

kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain.

RUMUS :

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak tidak langsung}$$

e. Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (*Personal Income*) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (*transfer payment*). *Transfer payment* adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya.

Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan

usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

RUMUS:

$$PI = (NNI + \text{transfer payment}) - (\text{Laba ditahan} + \text{Iuran asuransi} + \text{Iuran jaminan sosial} + \text{Pajak perseorangan})$$

f. Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. *Disposable income* ini diperoleh dari *personal income* (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang bebannya tidak dapat

dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

RUMUS:

$DI = PI - \text{Pajak langsung}$

Manfaat pendapatan Nasional :

1. Menilai prestasi ekonomi suatu bangsa
2. Menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu
3. Membandingkan perekonomian dengan negara lain
4. Menerangkan struktur perekonomian negara
5. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita

Pendapatan Nasional tahun 1997-1999

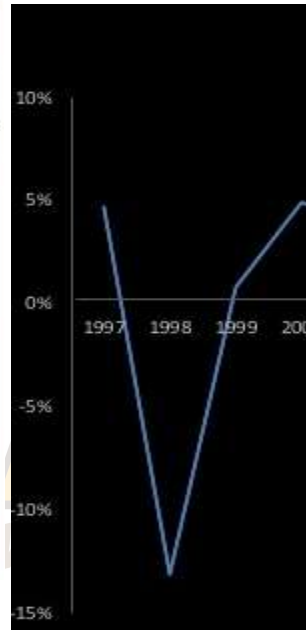
Tabel 2.7
Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha ¹⁾

Rincian	1997		1998		1999 ²⁾
	Pertum- buan	Sum- bangan	Pertum- buan	Sum- bangan	Pertum- buan
	Persen				
Produk Domestik Bruto	4,9	4,9	-13,7	-13,7	-10,3
Pertanian	0,7	0,1	0,2	0,0	2,7
Pertambangan dan penggalan	1,7	0,2	-4,2	-0,4	-0,7
Industri pengolahan	6,4	1,6	-12,9	-3,2	-9,6
Listrik, gas, dan air bersih	12,8	0,2	3,7	0,1	7,7
Bangunan	6,4	0,5	-39,7	-3,2	-5,0
Perdagangan, hotel, dan restoran	5,8	1,0	-19,0	-3,2	-14,1
Pengangkutan dan komunikasi	8,3	0,6	-12,8	-1,0	-18,3
Keuangan, persewaan, dan jasa	6,5	0,6	-26,7	-2,4	-47,6
Jasa-jasa	2,8	0,3	-4,7	-0,4	-0,2
Nonmigas	5,5	5,0	-14,8	-13,6	-11
Migas	-1,0	-0,1	-1,0	-0,1	-3,9

1) Atas dasar harga konstan 1993.

2) Triwulan I / 1999

Sumber : Badan Pusat Statistik

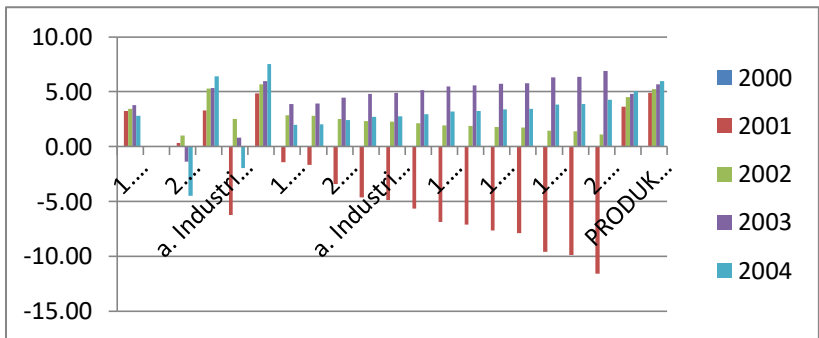


Sektor nonmigas mengalami kontraksi sebesar 14,8%, yang berarti memberikan sumbangan sebesar -13,6% kepada kontraksi ekonomi nasional. Sementara itu, sektor migas juga mengalami kontraksi, terutama dipengaruhi oleh melemahnya permintaan dunia dan turunnya

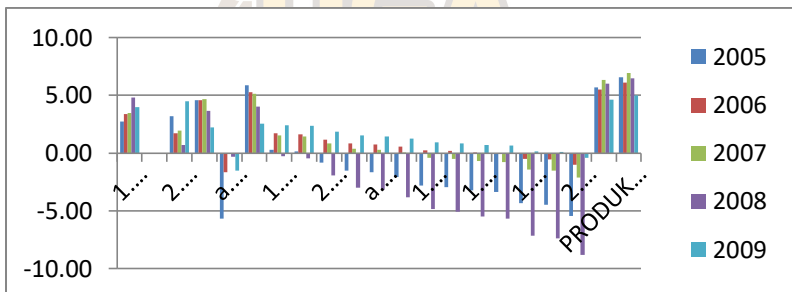
harga minyak di pasar internasional. Sektor bangunan merupakan sektor yang mengalami kontraksi terdalam. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih mengalami ekspansi, pada tahun 1998 sektor ini mengalami kontraksi sebesar 39,7%. Terpuruknya sektor ini terutama disebabkan oleh melonjaknya harga bahan bangunan, menurunnya permintaan pasar, besarnya beban utang para pengembang dan kontraktor, serta terputusnya jalur kredit dari sektor perbankan.

Dari grafik diatas menunjukan bahwa perekonomian indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 1998 dan mengalami kenaikan pada tahun 1999.

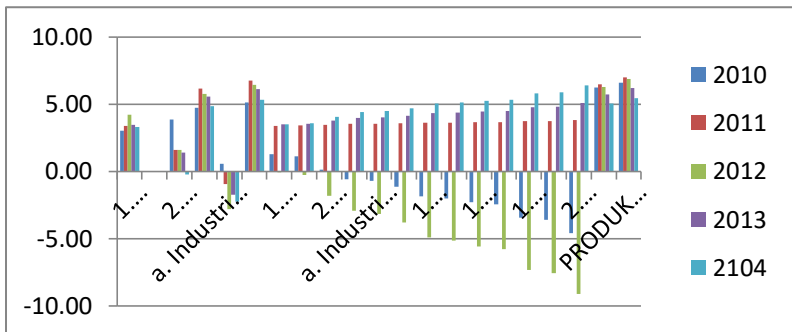
Grafik Pendapatan Nasional tahun 2000-2004



Grafik Pendapatan Nasional tahun 2005-2009



Grafik Pendapatan Nasional tahun 2010-2014



Dari data data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2000-2014 di Indonesia yang paling besar terdapat pada sektor industri pengolahan, lalu disusul dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, selanjutnya diikuti sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan yang terakhir adalah sektor listrik, gas dan air bersih.

1. Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta atau US\$3,377.1.
2. Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,38 persen.
3. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04 persen tertinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya tahun 2015, yaitu masing-masing sebesar 4,73 persen (triwulan I); 4,66 persen (triwulan II) dan 4,74 persen (triwulan III). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,52 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,32 persen.

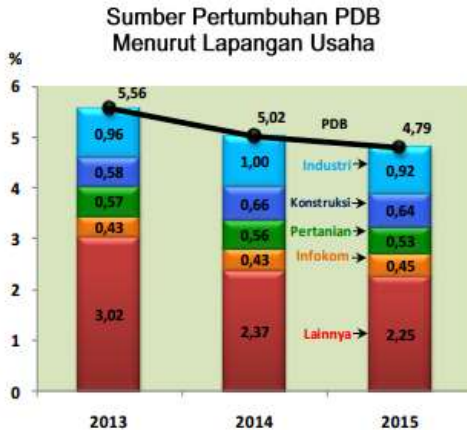
4. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi 1,83 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 23,34 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.
5. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,29 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,21 persen, dan Pulau Kalimantan 8,15 persen.

Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015
(persen)

Lapangan Usaha	Tria II-2015 berdasarkan Tria II-2013	Tria IV-2015 berdasarkan Tria II-2013	Tria II-2015 berdasarkan Tria II-2014	Tria IV-2015 berdasarkan Tria IV-2014	Laju Pertumbuhan 2015	Sumber Pertumbuhan 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,34	-23,34	3,54	1,51	4,02	9,93
B Pertambangan dan Penggalian	1,81	-0,23	-0,99	-7,81	-0,68	-0,47
C Industri Pengolahan	9,90	0,43	4,31	4,35	4,25	9,92
D Pengadaan Listrik dan Gas	-0,83	5,02	0,36	1,81	1,21	0,81
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Gas Rumah Kaca	2,06	0,28	0,15	6,77	7,17	0,81
F Konstruksi	4,88	6,39	0,92	9,34	9,05	0,84
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,80	-1,41	1,39	2,77	2,47	0,34
H Transportasi dan Pergudangan	4,08	1,40	7,25	7,87	6,08	9,25
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,01	2,05	4,48	5,79	4,36	0,13
J Informasi dan Komunikasi	2,18	1,71	10,74	9,24	10,00	9,45
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,08	3,09	10,56	12,02	8,55	0,22
L Real Estate	1,21	0,73	4,19	4,29	4,82	0,14
M/N Jasa Perusahaan	2,15	1,13	7,52	8,12	7,69	0,12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,26	10,87	1,27	6,70	4,75	0,16
P Jasa Pendidikan	1,86	9,46	0,98	5,32	7,86	0,23
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,75	7,26	0,32	7,44	7,10	0,08
R/S/T/U Jasa Lainnya	2,17	1,99	8,11	6,16	8,08	0,13
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	2,75	-1,87	3,86	4,81	4,19	4,80
Pajak Ditanggung Substansi Atas Produk	23,09	-0,10	39,81	49,05	31,88	0,79
Produk Domestik Bruto (PDB)	3,06	-1,97	4,79	5,66	4,79	4,79

Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa
Lapangan Usaha Tahun 2015





Perekonomian Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi 5,08%. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,53% dan Jasa lainnya sebesar 8,08%.

Struktur Perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan (20,29%); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,52%) dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi

Mobil-Sepeda Motor (13,29%). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015, Industri Pengolahan memiliki sumberpertumbuhan tertinggi sebesar 0,92%, diikuti Konstruksi sebesar 0,64%, dan Pertanian sebesar 0,53%.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang;
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat

pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; dan

3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut.

Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat

besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial.

C. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

Dimaksudkan dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor

ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat berdasarkan empat macam sudut tinjauan yaitu:

1. Tinjauan makro-sektoral

Sebuah perekonomian dapat berstruktur, misalnya agraris (*agricultural*), industrial (*industrial*), atau niaga (*commercial*), tergantung pada sektor produksi apa/ mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan.

2. Tinjauan keruangan (*spasial*)

Suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan/tradisional dan berstruktur kota/modern. Hal itu bergantung apakah wilayah pedesaan dengan teknologinya yang tradisional yang mewarnai

kehidupan perekonomian itu, ataukah wilayah perkotaan dengan teknologinya yang sudah relatif modern yang mewarnainya.

3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan

Suatu perekonomian dapat menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis. Tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan.

4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya

Dengan sudut tinjauan ini dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan yang desentralistis.

Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasawarsa 1990-

an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.



BAB 5. DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

Tujuan dari bab distribusi pendapatan dan kemiskinan ini adalah agar mahasiswa memahami distribusi pendapatan dan kemiskinan.

A. Kinerja Perekonomian Indonesia

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia setelah merdeka, adalah Demokrasi Terpimpin, yaitu era dimana “politik menjadi panglima”. Presiden Soekarno memfokuskan pembangunan pada upaya peningkatan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Fokus ini membuat perekonomian di Indonesia tidak tertata dengan rapi (miss management). Sebagai akibatnya perekonomian menjadi semakin hancur. Disebabkan oleh Politik Isolasi Nasional dan menumpuknya defisit APBN dari tahun ke tahun sejak tahun 50-an hingga penggalan pertama tahun 1960-an, maka di tahun 1965-66 terjadi suatu krisis ekonomi nasional yang sangat merisaukan, dan puncaknya Presiden Soekarno harus turun dari pucuk pimpinan Indonesia. Keadaan ini telah

menumbangkan Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) dan terbentuknya Orde Baru.

Di era pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memfokuskan diri pada pembangunan di “bidang perekonomian”. Ini ditandai dengan adanya grand planning pembangunan yaitu Repelita yang dimulai tahun 1969. Pada masa ini pembangunan perekonomian fokus pada upaya meningkatkan investasi luar negeri dan perdagangan. Perkembangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan terlihat mengesankan. Secara umum, indikator makroekonomi menunjukkan perkembangan angka dan kondisi mutakhir yang sangat baik. Tidak ada pertanda yang membuat khawatir banyak pihak, terutama bagi pemerintah dan otoritas moneter. Indikator makroekonomi yang dimaksud adalah: pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, nilai tukar rupiah, cadangan devisa dan neraca pembayaran. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an perekonomian Indonesia mengalami kenaikan pesat. Kenaikan ini sebagian besar ditopang dari kontribusi

eksploitasi sumber daya alam. Antara tahun 1985 – 1995 GDP Indonesia tumbuh 95% sementara inflasi dapat ditekan dibawah 10%. Pertumbuhan ekonomi ini, menurut Anwar A. (1996) dalam Munandar et al (2007), disebabkan karena meningkatnya konsumsi masyarakat serta kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA serta beberapa sektor kegiatan perekonomian lainnya sejak tahun 1994 sampai dengan awal tahun 1997.

Namun di sisi lain menurut Kwik Kian Gie (2009), pertumbuhan yang tinggi ini ternyata dibarengi oleh ketimpangan yang sangat besar antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, antara kelompok etnis yang satu dengan kelompok etnis lainnya. Pembangunan ekonomi dibarengi dengan tumbuh kembangnya KKN, dengan utang pemerintah yang meningkat terus sampai pemerintah tidak mempunyai kekuatan dana untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur,

pertahanan/ keamanan dan sebagainya. Pembangunan ekonomi selama Orde Baru juga tidak mampu menghapus adanya ekonomi dualistik yang membuat tidak adanya hubungan sama sekali antara ekonomi perkotaan dan perdesaan. Masing-masing bekerja sendiri-sendiri dimana ekonomi perdesaan dan rakyat kecil tidak pernah disentuh oleh kebijakan maupun bantuan pemerintah dalam memakmurkan mereka. Sebuah pemikiran bijak dikemukakan oleh Frans Seda (2002), bahwa antara ekonomi rakyat/ekonomi tradisional dan ekonomi modern tidak perlu diadakan dikhotomi. “Dual economy” nya Prof. Boeke, adalah suatu kenyataan dan merupakan dua kekuatan ekonomi yang perlu diintegrasikan menjadi sokoguru dari bangunan ekonomi nasional yang modern.

Pada pertengahan tahun 1997 dimana negara-negara di Asia terserang krisis, Indonesia juga mengalami dampaknya. Bahkan diantara Negara-negara di Asia yang paling parah terkena dampak krisis adalah Indonesia. Ini dibuktikan tidak hanya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, tetapi juga

berimbas pada masalah lain seperti sosial dan politik. Sehingga dikatakan bahwa Indonesia saat itu mengalami krisis multidimensional. Masalah sosial ditandai dengan timbulnya gerakan anti China dan juga konflik antar suku dan agama, sementara krisis politik ditandai dengan munculnya gerakan reformasi dan mundurnya Soeharto dari pucuk pimpinan Indonesia. Sebagai akibat dari krisis tersebut, pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi $-13,7\%$ dari pertumbuhan sebesar $+4,9\%$ di tahun sebelumnya (1997), atau jatuh dengan $18,6\%$ dalam setahun (Seda, 2002). Banyak pengamat menilai bahwa terjadinya dampak krisis yang begitu besar disebabkan karena rapuhnya fundamental perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi yang berlaku sekarang ini nyata-nyata telah mendorong perilaku konsumtif masyarakat dan telah menyeret begitu jauh perekonomian nasional untuk tumbuh secara instant. Hanya negara-negara kaya dengan perangkat kelembagaan ekonomi politik yang mantaplah yang bisa mengeliminasi dampak-

dampak negatif dari gelombang pergerakan finansial global ini (Nugroho, 2002).

Pemerintahan pasca Soeharto, terutama era Habibie (yang seterusnya dinamakan era reformasi), menjalankan program stabilisasi makroekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Program awal difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang sangat mendesak pada saat krisis, yaitu: meredam tekanan laju inflasi dan gejolak nilai tukar. Pemerintah berupaya agar keadaan moneter menjadi stabil dengan pertanda suku bunga yang normal dan nilai tukar rupiah yang realistis, sehingga dapat membantu kebangkitan kembali dunia usaha. Secara bersamaan, pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi di bidang fiskal melalui peningkatan disiplin anggaran dengan melakukan penghematan atas berbagai pengeluaran pemerintah. Pemerintah juga terpaksa melakukan penjadwalan dan penyesuaian terhadap beberapa proyek pembangunan. Dalam keseluruhan langkah tersebut, upaya restrukturisasi dan penyehatan perbankan menjadi prioritas yang sangat penting. Pengeluaran

biaya yang amat besar untuk itu juga dianggap wajar. Perbankan dan „non-ekonomi-rakyat“ yang notabene menjadi penyebab krisis berusaha „diselamatkan“ dengan menggunakan dana trilyunan rupiah dari sumberdaya negara yang telah sangat terbatas (Krisnamurthi, 2002). Pertimbangan utamanya, stabilitas moneter menjadi prasyarat bagi pemulihan ekonomi, dan itu memerlukan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan mensyaratkan pembenahan sektor perbankan, termasuk BI sebagai Bank Sentral.

Kegiatan perekonomian yang diharapkan akan bergairah dengan munculnya rezim pemerintahan baru ternyata tidak terbukti, keadaan perekonomian yang momburuk pada saat bersamaan dengan negara-negara lain seperti, Malaysia, Thailand, Korea, Brazil, dan lain-lain tidak dapat ditingkatkan, di lain pihak perekonomian dunia, bahkan negara-negara tetangga seperti yang disebutkan di atas telah mampu keluar dari kemelut krisis moneter namun di pihak Indonesia hal tersebut tidak semakin membaik namun para elit dan kelompok partai-partai politik

terus saja berpacu dan bergelut dengan perebutan kekuasaan sehingga lupa pada apa yang berhubungan dengan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin menimbulkan gejala sosial, pengangguran semakin bertambah, tingkat kemiskinan semakin besar, keluarnya investor-investor asing, pencucian uang, tingkat korupsi semakin merajalela mulai dari tingkat desa sampai ke pemerintah pusat tidak terkecuali para anggota legislatif yang dikenal dengan money politiknya semakin tidak dapat dibendung sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup nomor 3 (tiga) di dunia dan nomor 1 (satu) di Asia.

Dampak krisis ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang mengalami penurunan dalam GNP maupun pertumbuhan ekonomi paling parah di dunia. Krisis moneter telah membuyarkan "buaian" Indonesia dengan GNP dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita yang rnengagumkan dan cukup "fantatis" untuk ukuran sebuah negara sedang berkembang telah

hilang, kondisi perekonomian Indonesia menjadi terpuruk yakni mengalami kemunduran hingga mencapai minus 16,61 persen.

B. Disparitas Distribusi Pendapatan di Indonesia

Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecenderungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.

Kebijakan-kebijakan stabilisasi yang diambil oleh presiden Soeharto dan tim ekonominya dari tahun 1966 sampai tahun 1969 sangat sukses dalam upaya menurunkan inflasi ke level digit satu, dan memulihkan perekonomian menuju pertumbuhan

ekonomi yang terus menerus. Namun dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan menimbulkan banyak perdebatan. King dan Weldon (1977) dalam Booth (2000), membandingkan data pendapatan rumah tangga dan pengeluaran rumah tangga dari beberapa sumber untuk pulau jawa pada tahun 1963-1964 hingga tahun 1970. Mereka menemukan fakta terdapatnya ketidakmerataan pertumbuhan di daerah perkotaan (terutama Jakarta) walaupun di daerah pedesaan jauh lebih tidak mencolok. Pada tahun 1964 -1965, ketika inflasi dan dislocation ekonomi tinggi, menunjukkan bahwa inflasi dan stagnasi ekonomi mempunyai pengaruh lebih kuat terhadap pekerja urban. terutama mereka yang mempunyai pendapatan tetap, seperti pegawai pemerintah. Di daerah pedesaan, the better-off farmers yang mempunyai surplus makanan untuk dijual meningkatkan pendapatan relative mereka para pekerja urban dan orang miskin pedesaan. Ini menjelaskan, bahwa pada pertengahan 1960 ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan dalam hal pengeluaran konsumsi rendah. Penemuan yang

mengejutkan, menunjukkan bahwa ketidakmerataan sebenarnya lebih rendah di perkotaan dari pada di daerah pedesaan (sundrum 1973). Tren ini berubah secara lambat ketika inflasi turun dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pada tahun 1969 – 1970, Gini coefficient pengeluaran konsumsi per kapita di pedesaan Indonesia 0,34, yang mengindikasikan tingkat ketidakmerataan. Hal ini sedikit lebih rendah di daerah perkotaan, dimana berdasarkan survey tentang biaya hidup pada tahun 1968 – 1969 menunjukan bahwa Gini coefficient pendapatan rumah tangga sebesar 0.4 di Jakarta, Manado dan Yogyakarta, walaupun Gini coefficient di Bandung dan Surabaya, dan kebanyakan kota besar diluar jawa lebih rendah. Kesenjangan pengeluaran juga meningkat antara 1969-1970 hingga 1976, baik di perkotaan maupun pedesaan. Sebagaimana yang Asra (1989) dalam Booth (2000) tunjukkan, jika data pengeluaran pedesaan yang diambil pada 1976 dikoreksi berdasarkan perubahan harga yang berbeda oleh kelompok-kelompok desil, maka

ketidakmerataan pengeluaran di pedesaan meningkat baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Di daerah perkotaan Jawa ketidakmerataan dalam pengeluaran juga meningkat; Booth dan Sundrum (1981) memperkirakan bahwa pengeluaran di atas kelompok desil Jawa perkotaan meningkat 66% antara 1970 - 1976, dibandingkan dengan kenaikan kurang dari 20% di bawah kelompok desil. Rata-rata pengeluaran riil per kapita meningkat lebih cepat di Jakarta daripada di daerah perkotaan lainnya, dan lebih cepat di daerah perkotaan Jawa daripada di daerah perkotaan di luar pulau Jawa. Dampak dari trend ini adalah terdapatnya kesenjangan yang tajam antara perkotaan dan pedesaan, terutama di Jawa khususnya terhadap barang-barang non- makanan.

C. Profil Kemiskinan di Indonesia

Booth (2000), dalam penelitiannya telah menginventarisir data kemiskinan di Indonesia secara empiris. Tahun 1976 – 1981 menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan, dengan kecenderungan angka-angka

di bawah garis kemiskinan turun lebih tajam di daerah pedesaan. Tahun 1981 diperkirakan terdapat 40.6 juta orang Indonesia di bawah garis kemiskinan, dimana 31,3 juta orang diantaranya berada di wilayah pedesaan, dan 9.3 juta sisanya ada di wilayah perkotaan.

Selama dekade 1975-1985, pendapatan per kapita buruh tani rumah tangga tumbuh sedikit lebih cepat dari pada rata-rata nasional, sementara orang-orang miskin petani (yang beroperasi kurang dari 0,5 hektar) tumbuh lebih lambat, sehingga pada tahun 1985 rumah tangga buruh tani berpenghasilan rata-rata sedikit lebih baik dari pada rumah tangga petani miskin.

Antara 1976-1981, yang merupakan tahun-tahun bonanza minyak, penurunan angka kemiskinan rata-rata per tahun menurut BPS adalah 5,6%. Setelah 1981, pendapatan Indonesia dari ekspor minyak mulai turun, dan pemerintah menghadapi serangkaian kebijakan yang di desain untuk peningkatan ekspor non minyak, melakukan verifikasi dasar pajak dalam negeri, menarik lebih

banyak investasi asing, melakukan deregulasi sektor keuangan, dan meningkatkan efisiensi sektor perusahaan publik, dan kebijakan makro lainnya.

Tahun 1987-1996 (BPS), terjadi penurunan angka garis kemiskinan yang lebih lambat. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan, sedangkan pada tahun 1976-1987 jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di daerah pedesaan menurun hampir 7% per tahun, dan antara 1987 – 1996, tingkat penurunan angka kemiskinan tiap tahun melambat menjadi hanya sekitar 3% per tahun.

Antara tahun 1993 dan 1996, hasil Gini koefisien terhadap pengeluaran per kapita di daerah perkotaan Indonesia meningkat 0,33- 0,36; di daerah pedesaan meningkat hanya sedikit, dan tetap jauh lebih rendah dari daerah perkotaan. Peningkatan kemiskinan relatif di daerah- daerah pedesaan juga jauh lebih rendah. Pada tahun 1996, jumlah penduduk di desa yang pengeluarannya di bawah setengah pengeluaran rata-rata, mencapai setengah dari jumlah penduduk di perkotaan. Ada juga bukti

bahwa sejak pertengahan 1980-an mekanisme yang mempromosikan sebuah distribusi pendapatan yang egaliter di daerah pedesaan, mungkin berjalan kurang efektif di bandingkan pada dekade 1975-1985.

Pengalaman dari tahun 1987-1999 menunjukkan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi menurun di Indonesia. Dengan kata lain, pertumbuhan yang cepat pada tahun 1987-1999 disertai dengan peningkatan ketidakmerataan, terutama di daerah perkotaan, dan peningkatan ketidakmerataan ini mengurangi dampak pertumbuhan pada penurunan tingkat kemiskinan.

Pada tahun 1996, 43% dari penduduk miskin berada di luar Jawa dan Bali. Lebih dari 20% berada di Kalimantan, Sulawesi dan kepulauan bagian timur (NTT, NTB, Timor Timur dan Maluku). Tampaknya masih banyak yang meragukan teori yang mengatakan bahwa sektor pertanian yang relative terbelakang ditambah lagi dengan kepemilikan tanah yang sempit merupakan faktor utama yang

menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah pedesaan.

Tidak bisa disangkal bahwa pada masa pemerintahan soeharto Indonesia mengalami penurunan dalam angka kemiskinan absolute dan ada kenaikan dalam indikator-indikator kesejahteraan lainnya seperti tingkat kematian bayi dan angka melek huruf. Studi comparative menunjukkan bahwa akhir tahun 1980-an tingkat kemiskinan di Indonesia berada di bawah Filipina, meskipun jauh di atas Thailand dan Malaysia (Booth, 1997; Ahuja et al., 1997; Mizoguchi dan Yoshida, 1998; dalam Booth, 2000). Tetapi penurunan angka kemiskinan relatif melambat. Angka kemiskinan relatif yang meningkat begitu tajam di beberapa kota-kota terbesar di Indonesia antara tahun 1987 dan 1996 pada saat rata-rata pendapatan dan pengeluaran konsumen juga meningkat dengan cepat setidaknya merupakan sebagian penjelasan tentang adanya pertumbuhan sosial, ketegangan rasial dan agama yang menjadi

lebih jelas bahkan sebelum dampak krisis keuangan menghantam Indonesia pada akhir tahun 1997.

Walaupun terjadi penurunan kemiskinan di Indonesia antara tahun 1976 – 1996, masalah kemiskinan relatif dan kekurangan masih serius pada tahun-tahun terakhir rezim Soeharto, bahkan sebelum dampak krisis keuangan dan penyusunan program berikutnya terhadap pendapatan nasional. Saat krisis moneter tahun 1997, peningkatan angka kemiskinan terbesar terjadi di perkotaan, dimana jumlah penduduk miskin di perkotaan dalam periode tersebut meningkat lebih dari 80%. Padahal, dalam periode yang sama, jumlahnya di perdesaan hanya naik sebesar 30%. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah harus memberikan prioritas yang tinggi untuk program-program anti-kemiskinan.

Pada tahun 2002 – 2007, terdapat indikasi kuat bahwasanya meskipun terdapat kecenderungan positif dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi ternyata implikasinya belum seperti yang diharapkan. Proporsi penduduk yang hamper miskin masih cukup tinggi, dan apabila terjadi sedikit

'gejolak', maka dengan sangat mudah mereka akan kembali menjadi miskin. Namun tidak dapat dipungkiri, kesenjangan dan disagregasi kemiskinan memang terjadi di Indonesia. Saat ini (tahun 2007) proporsinya mencapai 16.6%, tetapi ada anggapan bahwa dibalik angka ini sebetulnya terdapat fakta kesenjangan antar provinsi yang cukup besar (Kuncoro, 2008).

D. Platform Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ke Depan

Pertumbuhan versus distribusi pendapatan merupakan masalah yang menjadi perhatian di negara-negara sedang berkembang (Arsyad, 2004). Banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dirasakan banyak orang tidak memberikan pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan

ketika tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diiringi dengan meningkatnya tingkat pengangguran dan pengangguran semu di daerah pedesaan maupun perkotaan. Distribusi pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin semakin senjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi besarnya kemiskinan absolut di negara-negara sedang berkembang.

Keyakinan mengenai adanya efek menetes ke bawah (trickle down effects) dalam proses pembangunan telah menjadi pijakan bagi sejumlah pengambil kebijakan dalam pembangunan. Dengan keyakinan tersebut maka strategi pembangunan yang dilakukan akan lebih terfokus pada bagaimana mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, konsekuensi negatif yang dapat muncul sebagai akibat jalan pintas yang diambil berdasarkan pengalaman masa lalu adalah pusat pembangunan ekonomi nasional dan daerah selalu dimulai pada wilayah-wilayah

yang telah memiliki infrastruktur lebih memadai, terutama Jawa. Selain itu pembangunan akan difokuskan pada sektor- sektor yang secara potensial memiliki kemampuan besar dalam menghasilkan nilai tambah yang tinggi terutama sektor industri dan jasa.

Kebijakan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru memiliki kecenderungan yang mengarah pada penerapan Trickle Down Effects, namun dalam “persepsi yang keliru”. Pembangunan lebih difokuskan pada daerah-daerah perkotaan ketimbang di perdesaan dengan harapan dapat memberikan multiplayer effect bagi pembangunan berkelanjutan di bawahnya. Padahal pemahaman secara harfiah terhadap Trickle Down Effect bukan semata-mata pada “multiplayernya”, namun pada upaya “pemerataan kue pembangunan”. Kebijakan yang keliru ini diilustrasikan oleh Seda (2002), bahwa melalui pemberdayaan sektor swasta maka diharapkan/dianggap Ekonomi Rakyat akan pula dapat diberdayakan. Jika pembangunan selama ini adalah “top down” maka proses ini tidak langsung

beralih ke sistim “bottom up”, namun melalui sistim (peng)antara “middle down” dan “middle up”. Namun kita tahu apa yang telah terjadi. Bukan proses “memberdayakan”, melainkan proses “memperdayakan”. “Up” dan “down” diperdayakan oleh si “middle”. Maka terjadilah krisis ekonomi yang berkelanjutan ini. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sulekale (2003) yang mengatakan, bahwa penyebab kemiskinan di Indonesia bukanlah kurangnya sumber daya alam, melainkan karena faktor non-alamiah, yaitu kesalahan dalam kebijakan ekonomi. Khusus pada era Orde Baru, kelompok-kelompok usaha yang telah memiliki sistem manajemen modern dengan jaringan koneksi internasional yang sudah cukup baik dapat memanfaatkan situasi yang tercipta dengan lebih baik karena lebih siap secara teknis. Tugas yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha tersebut adalah memperbesar kue ekonomi yang kecil untuk kemudian dapat dilakukan pemerataan dalam pola trickle-down effect. Namun dalam perkembangannya, pertumbuhan untuk

pemerataan tidak terjadi dengan mulus, bahkan kesenjangan sosial- ekonomi makin dirasakan melebar, dan akhirnya terjadi kerusuhan sosial yang memuncak pada tahun 1998.

Analisis yang didasarkan pada data kemiskinan tahun 1993 yang diterbitkan oleh BPS, dan hasil Sensus Pertanian tahun 1993, menunjukkan bahwa produktivitas pertanian per hektar dan ukuran kepemilikan lahan masih merupakan faktor yang menentukan timbulnya kemiskinan di pedesaan. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan harus lebih ditekankan pada sektor pedesaan dan pertanian jika angka kemiskinan ingin dikurangi di Indonesia. Bagaimanapun, program- program pembangunan di pedesaan seharusnya tidak difokuskan pada bahan pangan saja seperti program-program tahun-tahun sebelumnya, tetapi harus ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat miskin di daerah-daerah miskin. Program-program pembangunan pedesaan yang lebih efektif juga

akan membantu dalam membatasi tingkat kemiskinan di perkotaan.

Menurut Human Development Report 1995, yang dikeluarkan oleh UNDP, sebesar 1,3 miliar penduduk di negara berkembang hidup dalam kemiskinan, dan hampir 800 juta di antaranya tidak menderita kurang pangan. Banyak pihak menganggap bahwa Bank Dunia secara langsung telah menjadi penyebab utama meningkatnya kesenjangan dan ketimpangan sosial di suatu negara dan antar negara, atau dapat dikatakan bahwa Bank Dunia telah gagal melakukan usaha-usaha pengentasan kemiskinan melalui program dan kebijakan pemberian bantuan. Banyak prakarsa Bank Dunia mengenai kemiskinan baru-baru ini mengarah kepada gejala kemiskinan ketimbang mengarah kepada akar strukturalnya. Jika dikaitkan dengan upaya meningkatkan PDB/PNB per kapita (Gie, 2009), ternyata angka ini tidak juga bisa menjelaskan apa-apa tentang keadilan dalam pembagiannya. Karena itu pemerintah harus mengembangkan indikator baru yang

memperlihatkan keadilan dalam pembagian PDB/PNB pada seluruh kelompok masyarakat.

Upaya untuk menurunkan disparitas distribusi pendapatan selalu menunjukkan tren perlambatan. Garcia dan Soelistianingsih (1998) yang mendapatkan fakta bahwa antara 1975-1993 tendensi penurunan disparitas sempat terhenti pada 1983. Wibisono (2003) menemukan bahwa penurunan disparitas yang cepat terjadi pada pertengahan 1970- an hingga 1980-an. Setelah itu penurunan disparitas mengalami perlambatan pada pertengahan 1980-an hingga 1990-an. Hal yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Akita dan Lukman (1995) menemukan bahwa disparitas PDRB per kapita mengalami penurunan yang kontinu antara 1975-1992. Studi empirik disparitas pendapatan regional yang diukur dengan indeks Gini menunjukkan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi regional (Puspita, 2006).

Masalah kemiskinan bukanlah sekedar masalah yang dapat dipecahkan oleh para ekonom, tetapi harus dipecahkan secara

multidisipliner/interdisipliner oleh para ahli, karena bersifat multi- dimensional, dan dimensi-dimensi kemiskinan tersebut saling mengkait antara satu dengan yang lain (Arsyad, 1992). Lebih lanjut dikatakan, bahwa pemecahan masalah kemiskinan seperti halnya masalah distribusi pendapatan, tidak dapat dilakukan melalui sistem mekanisme pasar. Oleh karena itu peranan pemerintah dituntut lebih banyak. Selain itu dukungan organisasi-organisasi sosial seperti LSM-LSM sangat dibutuhkan. Dengan kata lain masalah ini harus menjadi concern kita bersama, kalau memang tujuan akhir pembangunan kita adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya faktor-faktor ekonomi yang diperhatikan, tetapi faktor-faktor non ekonomipun tidak boleh luput dari perhatian (Mubiarto, 2002), karena kenyataannya faktor-faktor non- ekonomi telah memberikan sumbangan besar bagi keberhasilan program ekonomi. Inilah ekonomi kelembagaan (institutional economics) ajaran ekonomi John R. Commons yang lebih menekankan kerjasama (cooperation) dan tindakan bersama

(collective action) dalam pemecahan masalah pertarungan kepentingan-kepentingan ekonomi (conflict of interest) ketimbang persaingan (competition). Suatu masyarakat kecil seperti masyarakat Yogyakarta yang "budaya"-nya relatif tinggi termasuk budaya gotong-royongnya, dapat menciptakan suasana mendukung (conducive) bagi program-program pembangunan masyarakat terutama program-program penanggulangan kemiskinan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, peran Pemerintah Daerah dalam membangun daerah menjadi titik sentral dan menjadi sangat besar, karena daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri. Ini merupakan perubahan besar dalam sejarah tata pemerintahan. Kunci utama dari upaya penanggulangan kemiskinan di daerah adalah terbangunnya, serta melembaganya jaringan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dari tiga pilar yang ada di daerah: Pemda, Masyarakat dan kelompok peduli (LSM, swasta, perguruan tinggi,

ulama/tokoh masyarakat, dan pers). Permasalahan kemiskinan hanya dapat ditanggulangi jika tiga komponen di atas saling bekerjasama dalam semangat kebersamaan, dan berpartisipasi mencari alternatif pemecahan masalah.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri” (Sulekale, 2003). Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri Bersama komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat. Upaya-upaya menyeragamkan penanggulangan kemiskinan menurut model tertentu hanya akan menemukan kemungkinan yang lebih besar untuk gagal dalam mencapai sasarannya. Hal-

hal yang perlu ditinggalkan oleh para pembuat kebijakan adalah melakukan kontrol yang mematikan inisiatif maupun partisipasi penduduk miskin.

Kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kestabilan makro ekonomi perlu dikaji secermat mungkin agar fundamental perekonomian tidak mudah goyah terhadap berbagai guncangan. Munandar et al, (2007), menemukan bahwa kebijakan moneter yang berhati-hati (prudent), yaitu kebijakan moneter yang diarahkan pada tercapainya inflasi yang rendah dan kondisi ekonomi makro yang stabil secara berkesinambungan, merupakan kebijakan yang secara relatif lebih menguntungkan provinsi-provinsi kurang maju. Selanjutnya karena tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung ditemukan di berbagai wilayah yang kurang maju tersebut, kebijakan moneter yang prudent tampaknya merupakan kebijakan moneter yang berpihak pada golongan miskin (pro poor).

Pengalaman telah membuktikan bahwa akibat kebijakan makro ekonomi Indonesia yang

salah sebelum terjadinya krisis telah membawa dampak sangat buruk bagi perekonomian bangsa. Bukan kebetulan jika Indonesia setuju dengan kebijakan-kebijakan yang begitu membebani rakyatnya. Utang menggunung yang didatangkan untuk menimbun kekayaan elit negara membuat pemerintah tidak ada pilihan lagi. Utang luar negeri Indonesia terus menduduki tingkat tertinggi di antara negara Asia lainnya. Sudah jelas “kami” membebani utang yang begitu mencengangkan hingga negara ini tidak mampu melunasi. Maka Indonesia dipaksa menebus utang dengan memuaskan hasrat korporasi “kami”. Dengan begitu tujuan “kami” para “bandit ekonomi” tercapai (Perkins, 2009).

Adalah kepentingan para elit ekonomi, termasuk penerima BLBI untuk mengesankan bahwa krisis ekonomi masih terus berjalan, dan makin parah, agar pemerintah tetap tidak dapat bersikap keras pada mereka untuk membayar utang-utang besar yang macet sejak awal krismon. Utang-utang besar yang macet menjadi amat berat karena

banyak utang dalam bentuk valuta asing yang tidak dijamin sehingga jika ekonomi Indonesia sudah dianggap pulih dari kondisi krisis, mereka para pengutang akan kehilangan alasan untuk tidak membayarnya. Inilah alasan “tersembunyi” untuk terus memojokkan pemerintah yang sayangnya memperoleh dukungan pakar-pakar ekonomi makro yang tidak pernah meninggalkan meja komputernya dan tidak pernah mau menerapkan metode analisis induktif-empirik dengan cara datang ke daerah-daerah meneliti kehidupan ekonomi riil (real-life economics). Mereka membesar-besarkan dampak krisis dengan menyebutkan pengangguran yang mencapai 40 juta orang, pelarian modal asing US\$ 10 milyar per tahun dan lain-lain (Mubiarto, 2002).

BAB 6. KEPENDUDUKAN, KETENAGAKERJAAN, KESEMPATAN KERJA, PENGANGGURAN

Tujuan dari bab kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, pengangguran ini adalah agar mahasiswa memahami kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, pengangguran. Dimana kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawian, kehamilan, kematian, persebaran mobilitas, dan kualitas serta pertahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ketenagakerjaan (tenaga kerja) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat dan merupakan modal bagi bergeraknya perekonomian suatu negara. Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan

keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yaitu : kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan disini terdapat empat pokok kajian yang akan dibahas di dalam pembahasan yang terdapat di dalam bab selanjutnya. Antara keempat pokok kajian tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang nantinya berada pada suatu titik atau suatu lingkaran yang saling bersinergi dan mempengaruhi yang namanya sistem perekonomian Indonesia.

A. Pengertian Kependudukan

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Jadi, apakah kependudukan itu ? kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, keatian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi kependudukan.

Perkembangan kependudukan ialah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Kualitas kependudukan adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan,

kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-studi tentang kependudukan (population studies). Demografi berasal dari kata Yunani, demos- penduduk dan grafein- tulisan atau dapat diartikan tulisan .

Tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran, dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Ilmu demografi juga ada yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif.

Demografi yang bersifat kuantitatif (kadang-kadang disebut formal demography- demography formal) lebih banyak menggunakan hitungan-hitungan statistik dan matematik. Tetapi demografi yang bersifat kualitatif lebih banyak

menerangkan aspek-aspek kependudukan secara deskripsi analitik. Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya.

Ilmu kependudukan yang perlu mendapat perhatian kita sekarang adalah lebih menyerupai studi antar disiplin ilmu yang dipadu dengan analisis demografi yang lazim diberi istilah demografi sosial. Disiplin lain banyak berhubungan dengan demografi antara lain matematika, geografi, sosiologi, ekonomi, dan kedokteran.

B. Tujuan Dan Kegunaan Ilmu Kependudukan

Dalam mempelajari demografi, ada tiga komponen terpenting yang perlu selalu kita perhatikan, cacah kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. Sedangkan dua faktor penunjang lainnya yang terpenting ialah mobilitas sosial dan tingkat perkawinan.

Ketiga komponen pokok dan dua faktor penunjang kemudian digunakan sebagai variabel atau perubah yang dapat menerangkan hal ihwal tentang jumlah dan distribusi penduduk pada tempat tertentu, tentang pertumbuhan masa lampau dan persebarannya. Tentang hubungan antara perkembangan penduduk dengan berbagai variabel atau perubah sosial, dan tentang prediksi pertumbuhan penduduk dimasa mendatang dan berbagai kemungkinan akibat-akibatnya.

Berbagai macam informasi tentang kependudukan sangat berguna bagi berbagai pihak di dalam masyarakat. Bagi pemerintah informasi tentang kependudukan sangat membantu di dalam menyusun perencanaan baik untuk pendidikan, kesejahteraan, pertanian, pembuatan jalan-jalan atau bidang-bidang lainnya. Bagi sektor swasta informasi tentang kependudukan juga tidak kalah pentingnya. Para pengusaha industri dapat menggunakan informasi tentang kependudukan untuk perencanaan produksi dan pemasaran.

C. Sejarah Pertumbuhan Penduduk Didunia Dan Indonesia

Nampaknya sukar untuk mengetahui secara tepat kapan munculnya makhluk yang disebut homo sapiens (manusia) di dunia ini. Para ahli memperkirakan pada sekitar 35.000 tahun yang lalu. Waktunya mungkin tidak dipermasalahkan, akan tetapi yang jelas angka pertambahan penduduknya sangat lambat. Pada tahun 1 sesudah masehi, penduduk dunia diperkirakan berjumlah 250 juta jiwa. Jadi membutuhkan waktu 35.000 tahun untuk mencapai jumlah penduduk 250 juta orang.

Pada tahun 1650, penduduk dunia diperkirakan berjumlah 500 juta jiwa. Jadi diperlukan waktu sekitar 1650 tahun menjadikan penduduk dunia dua kali lipat. pada tahun 1850 penduduk dunia menjadi 1 milyar jumlahnya. Dan masih diperkirakan waktu sekitar 200 tahun untuk menjadikan penduduk dua kali lipat dari jumlah sebelumnya.

Pada tahun 1930 penduduk dunia diperkirakan mencapai dua milyar jiwa. Dengan

deikian hanya diperlukan waktu kurang dari 100 tahun untuk menjadi penduduk dunia dua kali lipat sebelumnya.

Pada tahun 1976 penduduk dunia telah mencapai empat milyar jiwa. Jadi hanya diperlukan sekitar 36 tahun saja untuk melipat gandakan penduduk dunia dari jumlah sebelumnya.

Pada tahun 1985 penduduk dunia sudah mencapai 4,845 milyar jiwa. Dalam tempo hanya 9 tahun saja pertambahan penduduknya mencapai 845 juta jiwa. Istilah *population explotion* menggambarkan betapa hebatnya angka pertumbuhan penduduk dunia dewasa ini sehingga sebuah ledakan bom yang dasyat.

Entah bagaimana jadinya planet bumi kita ini pada tahun 2000 mendatang. Berdasarkan perhitungan pada ahli, penduduk dunia pada saat itu akan mencapa 8 milyar jiwa. Para ahli dan orang orang oawam sama-sama tercengang melihat fakta membuat semacam spekulasi. Salah satu spekulasi menyebutkan bahwa pada masa 900 tahun mendatang hanya akan terdapat area tempat tinggal

1/32 inci persegi untuk setiap orang di dunia (Nuveen, 1966).

D. Pengertian Ketenagakerjaan

Dalam ketenagakerjaan, penduduk dengan segala potensi yang dimilikinya dikategorikan menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Di Indonesia, yang termasuk penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 hingga 65 tahun. Pada usia tersebut mereka dapat melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan batasan tersebut berarti kamu termasuk penduduk usia kerja. Sebaliknya, penduduk di luar usia kerja adalah penduduk yang usianya diluar batasan tersebut. Jadi tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan,

mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga.

E. Peran UU Terhadap Ketenagakerjaan

Menurut UU No.13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dan merupakan modal bagi bergeraknya perekonomian negara.

Angkatan kerja adalah penduduk berumur lima belas tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau mempunyai pekerjaan, sementara tidak bekerja, dan mereka tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Dari keseluruhan angkatan kerja dalam suatu negara tidak semua mendapat kesempatan untuk bekerja sehingga angkatan kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang menganggur (pengangguran terbuka). Pekerja yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih

sekolah, mengurus rumah tangga, dan yang lainnya. Seperti penyandang cacat mental ataupun lainnya yang membuat seorang tidak produktif.

F. Pengertian Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja pada suatu negara merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber ekonomi dalam proses produksi untuk mencapai kesejahteraan. Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan.

Kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yaitu : kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer.

G. Kaitannya Kesempatan Kerja Dengan Pengangguran

Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Dari sisi tenaga kerja, penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja dan kelompok penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berumur 10 hingga 65 tahun. Namun dewasa ini usia kerja tersebut telah diubah menjadi umur 15 hingga 65 tahun.

Penduduk usia kerja dapat pula kita bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah semua orang yang siap bekerja disuatu negara. Kelompok tersebut biasanya disebut sebagai kelompok usia produktif.

Dari keseluruhan angkatan kerja dalam suatu negara tidak semuanya mendapat kesempatan kerja. Diantaranya ada pula yang tidak bekerja bekerja. Mereka inilah yang disebut pengangguran.

Pengangguran adalah angkatan kerja atau kelompok usia produktif yang tidak bekerja.

Angkatan kerja banyak yang membutuhkan lapangan pekerjaan, namun umumnya baik di negara berkembang maupun negara maju, laju pertumbuhan penduduknya lebih besar dari pada laju pertumbuhan lapangan kerjanya. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja tersebut, sebagian tidak bekerja atau menganggur.

Dengan demikian, kesempatan kerja dan pengangguran berhubungan erat dengan ketersediannya lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan pekerjaan disuatu negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktifnya, sehingga semakin kecil tingkat penganggurannya. Sebaliknya, semakin sedikit lapangan kerja di suatu negara, semakin kecil pula kesempatan bagi penduduk usia produktifnya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penganggurannya.

H. Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15-65 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP/SMA/mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari presentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%.$$

Jenis-jenis pengangguran

1. pengangguran friksional, adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran struktural, adalah keadaan dimana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
3. Pengangguran musman, adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya, seperti petani yang menanti musim tanam, tukang jual durian yang menanti musim durian.
4. Pengangguran siklinal, adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran.
5. Pengangguran sukarela atau voluntary unemployment, adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

BAB 7. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tujuan dari bab indeks pembangunan manusia ini adalah agar mahasiswa memahami pengertian indeks pembangunan manusia.

A. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selanjutnya bagaimanakah keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan?

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai macam

ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau negara. Dengan demikian, Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Dari tahun ke tahun perhatian pemerintah khususnya para elit kekuasaan, politisi termasuk para pengamat, akademis dan peneliti tertuju pada laporan *Human Development Index* (HDI) yang dipublikasikan setiap tahun oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) yaitu lembaga dunia yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Laporan penyajian pembangunan sumber daya manusia (SDM) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seringkali memunculkan polemik dan pro-kontra, namun semuanya sepakat bahwa pembangunan SDM sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Daerah maupun Nasional pada

berbagai bidang terutama terkait dengan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain.

Untuk itu peningkatan mutu sumber daya manusia adalah suatu keharusan yang tidak saja bertumpu pada tanggung jawab pemerintah (negara) namun semua pihak baik keluarga dan masyarakat secara kelompok berkepentingan lainnya (*stakeholders*). Peningkatan kualitas SDM ini perlu upaya sistematis sehingga harus terintegrasi dalam semua aspek kehidupan; ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, budaya dan kehidupan sosial lainnya.

B. Perkembangan Model Pembangunan Manusia di Indonesia

Menurut UNDP (1990) pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah

“perluasaan pilihan“ dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan ini jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social wefare*), dan pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Empat unsur utama yang terkandung dalam paradigma Pembangunan Manusia tersebut adalah produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini, UNDP melihat pembangunan

manusia sebagai macam “model” pembangunan tentang penduduk, dan oleh penduduk, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tentang penduduk; berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.
- b. Untuk penduduk; berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan ekonomi dalam negeri).
- c. Oleh penduduk; penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Untuk mengukur tingkat pemenuhan ke-tiga unsur diatas, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu: angka harapan hidup (*life expectancy at age 0 : eo*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate : lit*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling : MYS*) dan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*) – yang merupakan ukuran pendapat yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli. Indikator pertama mengukur

“umur panjang dan sehat”, dua indikator berikutnya mengukur “pengetahuan dan keterampilan”, sedangkan indikator terakhir mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan HDI yang dalam publikasi ini diterjemahkan menjadi IPM.

Berdasarkan perhitungan IPM dapat digambarkan bahwa negara yang baik adalah negara yang penduduknya mempunyai tingkat kesehatan yang baik, pemikiran yang cerdas, dan kekuatan daya beli yang baik. IPM bukan ukuran yang menyeluruh mengenai pembangunan manusia, sehingga perlu dilengkapi dengan indikator lainnya yang jumlahnya masih banyak (Ananta 1996, Agung 1997). Indeks ini memang tidak melihat pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, angka kematian, status gizi, imunisasi, akses ke media masa, kematian maternal, angka prevalensi kontrasepsi, dan sebagainya. Indeks ini memang hanya disusun dari tiga indikator dasar yang data umumnya

umumnya tersedia di setiap negara sehingga bisa diperbandingkan.

Walaupun terjadi perubahan-perubahan berupa berbagai penambahan atau penyesuaian, prinsip dasar pengukuran IPM tetap sama. Pada intinya, kesehatan diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir, pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf dewasa yang memiliki timbangan $2/3$ dan *erollment ratio* untuk pendidikan dasar, menengah, dan atas yang memiliki timbangan $1/3$, serta pendapatan per kapita yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Pada IPM sebelumnya, pendidikan diukur dengan tahun sekolah, namun karena variabel ini tidak selalu tersedia di setiap negara, lalu diganti dengan *enrollment ratio*.

Daya beli diukur dengan *purchasing power parity* (PPP) dalam dolar Amerika (US\$) yang mencoba menyesuaikan pendapatan per kapita tiap negara dengan daya beli di negara yang bersangkutan. Penyesuaian ini didasarkan pada kenyataan bahwa 10 US\$ di Indonesia jauh lebih

bernilai dibandingkan 10 US\$ di Amerika. Penyesuaian ini menjadi menarik karena telah memperhitungkan perbedaan daya beli. Untuk perhitungan IPM, BPS (1997) menggunakan pengeluaran riil per kapita. Sejauh ini, belum ada hasil analisa yang memadai tentang penggunaan indikator PPP yang diyakini lebih akurat untuk mengukur IPM di tingkat Kabupaten / Kota.

C. IPM untuk Perencanaan Pembangunan

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan disuatu wilayah tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang, dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses

terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan perkapita yang disesuaikan.

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (eo) yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode brass atau varian trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup per wanita usia 15-49 tahun. Komponen pengetahuan diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu melek huruf penduduk 16 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah. Indikator melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komponen standar hidup layak diukur menggunakan indikator konsumsi riil yang disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB perkapita riil yang telah disesuaikan

(*adjust real percapita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara atau wilayah. Perhitungan ketiga komponen di atas menunjukkan bahwa setiap komponen merupakan hasil perhitungan tersendiri dan bukan merupakan hasil perhitungan dari indikator-indikator lain. Sehingga tidak dapat dibentuk suatu model yang terdiri dari indikator-indikator pembentukan setiap komponen. Karena itu, pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah harus dilengkapi dengan kajian dan analisis situasi terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi perkembangan nilai IPM.

Pendekatan logis yang dilakukan menghasilkan variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi setiap komponen IPM. Namun demikian, variabel-variabel tersebut tidak secara mutlak mempunyai keterkaitan langsung dengan komponen-komponen IPM. Sehingga besar kontribusi masing-masing variabel terhadap komponen IPM belum terukur. Selain itu, variabel-

variabel tersebut bergerak secara dinamis, artinya variabel yang mempengaruhi akan terus berubah sesuai dengan kajian dan analisis situasi. Oleh karenanya belum dapat ditetapkan model keterkaitan yang baku dari setiap variabel didalam komponen IPM yang dapat digunakan dalam menentukan nilai IPM akan dicapai.

D. Fungsi dan Keterbatasan

Pada dasarnya IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah bahkan antar waktu. Fungsi utama sebagai alat banding ini sejalan dengan fungsi yang dikenal sebelumnya, yang disebut Indeks Mutu Hidup (IMH) atau *Physical Quality of Life Index (PQLI)*, yaitu suatu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen :

1. Angka kematian bayi (AKB) atau IMR
2. Angka harapan hidup umur 1 tahun (e_1), dan
3. Angka melek huruf (Lit)

Salah satu kritik mendasar terhadap IMH adalah bahwa dua komponen pertama kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti dibuktikan oleh kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga sebenarnya cukup diwakili oleh salah satu saja. Kelemahan inilah yang antara lain melatarbelakangi diperkenalkannya indeks komposit baru yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun demikian, IPM nampaknya meneruskan tradisi mengemban nama 'bombastis' seperti halnya IMH, yaitu mencoba menggambarkan suatu angka indeks. Adalah suatu kemustahilan bahwa pembangunan manusia dalam artian yang luas dapat diukur hanya dengan satu indeks komposit, tak peduli seberapa banyak komponen indikatornya – apalagi jika diingat bahwa semakin banyak variabel yang dimasukkan kedalam indeks komposit tersebut semakin tinggi pula kemungkinan besarnya kesalahan. Hal yang sama juga berlaku bagi IMH, karena mutu hidup sendiri juga mempunyai arti yang sangat luas. Barangkali,

persamaan ini hanya untuk keperluan menarik perhatian.

Disamping itu, IPM juga masih mempunyai kelemahan sebagaimana yang terkandung dalam IMH, yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa konsep/definisi dan kualitas data yang digunakan antar negara sangat beragam sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding international.

Kelemahan yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual. Jelasnya IPM suatu wilayah (provinsi, kabupaten /kota, misalnya) tidak bermakna tanpa dibandingkan dengan IPM wilayah lain. Akhirnya, kelemahan lain yang juga melekat (*inherent*) dalam suatu indeks komposit seperti IPM adalah ketidakmampunya dalam memberikan saran kebijaksanaan (*policy implication*) yang jelas. Dan ini memang bukan tujuan pembentukan indeks tersebut.

BAB 8. INVESTASI

Tujuan dari bab investasi ini adalah agar mahasiswa memahami pengertian dan fungsi investasi

A. Pendahuluan

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi.

Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi yang dilakukan.

Menurut Sunariyah “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Dewasa ini banyak negara-

negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

Menurut Husnan menyatakan bahwa “proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.” Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan dan lain-lain. Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang. Suatu rencana investasi perlu dianalisis secara seksama.

Defenisi investasi menurut PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk

pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa, untuk apresiasi **nilai investasi** atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. **Investasi** dapat juga dianggap sebagai pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Perlakuan akuntansi untuk investasi dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya diatur dalam PSAK 13.

Properti investasi didefinisikan dalam PSAK 13 sebagai properti (yaitu tanah dan bangunan) yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam bisnis atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Baik properti yang dikuasai oleh pemilik maupun oleh penyewa (*lessee*) melalui sewa

pembiayaan dapat dikelompokkan sebagai properti investasi. Namun, hak atas properti yang dimiliki oleh lesse melalui sewa operasi dapat dikelompokkan dan dicatat sebagai properti investasi (selama properti tersebut tidak bertentangan dengan definisi properti investasi dan *lesse* menggunakan model nilai wajar.)

PSAK 13 menyebutkan contoh aset yang tidak termasuk dalam definisi properti akuntansi :

- a. Properti yang digunakan sendiri (*owner-occupied property*), termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri dan properti yang digunakan oleh karyawan pemilik properti tersebut.
- b. Properti dalam proses konstruksi/pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi. Penting bagi perusahaan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi.

Menurut PSAK 13 properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir kedalam entitas; dan
- b. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

B. Jenis-Jenis Investasi

Menurut Senduk bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain:

- a. Tabungan di bank
Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan.
- b. Deposito di bank
Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak

dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu (tersedia pilihan antara satu, tiga, enam, dua belas, sampai dua puluh empat bulan, tetapi ada juga yang harian). Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank.

c. Saham

Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham, berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut deviden. Saham juga bisa dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih harganya disebut capital gain maupun lebih rendah

daripada kita membelinya yang selisih harganya disebut capital loss. Jadi, keuntungan yang bisa didapat dari saham ada dua yaitu deviden dan capital gain.

d. Properti

Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang bisa didapat dari properti ada dua yaitu :

- Menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa.
- Menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

e. Barang-barang koleksi

Contoh barang-barang koleksi adalah perangko, lukisan, barang antik, dan lain-lain. Keuntungan yang didapat dari berinvestasi pada barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain.

f. Emas

Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi

tujuh negara yang memiliki perekonomian yang kuat, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G-7. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri.

g. Mata Uang Asing

Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas (free float) yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia

mengambang bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif.

h. Obligasi

Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Karena sifatnya yang hampir sama dengan deposito, maka agar lebih menarik investor suku bunga obligasi biasanya sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga deposito. Selain itu seperti saham kepemilikan obligasi dapat juga dijual kepada pihak lain baik dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah daripada ketika membelinya.

C. Resiko Dalam Investasi

Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu resiko dalam retern. Resiko mempunyai hubungan positif dan linear dengan return yang di harapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar ritern yang di

harapkan semakin besar pula resiko yang harus di tanggung oleh seorang investor. Dalam melakukan keputusan investasi, khususnya pada sukuritas saham, return yang di peroleh berasal dari dua sumber, yaitu deviden dan capital gain, sedangkan resiko investasi saham tercermin pada variabilitas pendapatan (return saham) yang di peroleh.

Jorion, menyetakan resiko sebagai volatility dari suatu hasil yang tidak diekspektasi, secara jeneral, nilai dari aset atau kewajiban dari bunga. Gup, mengemukakan bahwa risiko adalah penyimpangan dari return yang di harapkan (expected return), sedangkan menurut Jones resiko adalah kemungkinan pendapatan yang diterima (actual return) dala suatu investasi akan berbeda dengan pendapatan yang di harapkan (expected return). Brigham dan Gapennski, berpendapat bahwa risiko merupakan kemungkinan keuntungan yang di teriama lebih kecil dari keuntungan dari keuntungan yang di harapkan.

Dalam teori portofolio, risiko dinyatakan sebagai kemungkinan keuntungan menyimpang

dari yang diharapkan. Dalam teori portofolio, risiko dinyatakan sebagai kemungkinan keuntungan menyimpang dari yang di harapkan. Karenanya resiko mempunyai dua dimensi, yaitu menyimpang lebih besar atau lebih kecil dari return yang diharapkan. Karenanya resiko mempunyai dua dimensi, yaitu menyimpang lebih besar atau lebih kecil dari return yang di harapkan. Ukuran ini dinyatakan dalam standar deviasi) yang merupakan ukuran untuk resiko total.

Menurut tandelilin, dalam analisis tradisional, risiko total dari berbagai aset keuntungan bersumber dari:

1. Interest Rate Risk. Resiko yang berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga sukuritas.
2. Market Risk. Risiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sukuritas.

3. Inflation Risk. Suatu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah purchasing power risk. Jika suku bunga naik, maka inflasi juga meningkat, karena lenders membutuhkan tambahan premium inflasi untuk mengganti kerugian purchasing power.
4. Business Risk. Resiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu.
5. Financial Risk. Risiko yang timbul karena penggunaan leverage finansial oleh perusahaan.
6. Liquidity Risk. Risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana sekuritas di perdagangan. Suatu investasi jika dapat di beli dan di jual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut dikatakan liquid, demikian sebaliknya.

Country risk. Risiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah pada political risk. Berbeda dengan analisis tradisional, analisis

investasi modern membagi resiko total menjadi dua bagian, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis (Husnan, 1998). Risiko yang tidak sistematis adalah resiko yang di sebabkan oleh faktor-faktor pada suatu sukuritas, dan dapat dihilangkan dengan menghilangkan diversifikasi. Sedangkan resiko sistematis adalah risiko yang di sebabkan oleh faktor-faktor makro yang memengaruhi semua sukuritas sehingga tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi, karena sebagian resiko dapat di hilangkan dengan diversifikasi, yaitu risiko tidak sistematis (Unique risk), maka ukuran resiko dari suatu portofolio bukan lagi standar deviasi (resiko total), tetapi hanya resiko sistematis saja, yaitu resiko yang tidak bisa di hilangkan dengan di versifikasi.

BAB 9. PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT DAN PENGELUARAN PEMERINTAH

Tujuan dari bab pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah ini adalah agar mahasiswa memahami pengertian dan pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah.

A. Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Pengeluaran Konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional. menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini lazim dilambangkan dengan huruf C (Consumption). Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan lazim dilambangkan dengan huruf S (Saving). Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Dilain pihak jika tabungan semua orang dalam suatu

negara dijumlahkan hasilnya adalah tabungan masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, tabungan masyarakat bersama-sama dengan tabungan pemerintah membentuk tabungan nasional. Dan tabungan nasional merupakan sumber dana investasi.

Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara makroagregat pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, makin besar pula pengeluaran konsumsi. Perilaku tabungan juga begitu. Jadi bila pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Perbandingan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut kecenderungan untuk mengkonsumsi (Marginal Propensity to Consume, MPC). Sedangkan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save, MPS). Pada masyarakat yang kehidupan ekonominya relatif belum mapan,

biasanya angka MPC mereka relatif besar, sementara angka MPS mereka relatif kecil. Artinya jika mereka memperoleh tambahan pendapatan maka sebagian besar tambahan pendapatannya itu akan teralokasikan untuk konsumsi. Hal sebaliknya berlaku pada masyarakat yang kehidupan ekonominya sudah relatif lebih mapan.

Perbedaan antara masyarakat yang sudah mapan dan yang belum mapan antara negara maju dan negara berkembang bukan hanya terletak dalam atau dicerminkan oleh perbandingan relatif besar kecilnya MPC dan MPS, akan tetapi juga dalam pola konsumsi itu sendiri. Pola konsumsi masyarakat yang belum mapan biasanya lebih didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan pengeluaran konsumsi masyarakat yang sudah mapan cenderung lebih banyak teralokasikan ke kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.

Beberapa pandangan ahli mengenai perilaku konsumen antara lain :

1. Yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka (Schiffman dan Kanuk

Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa (1994)

2. Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. (Engel, Blackwell, dan Miniard; 1993)
3. Perilaku konsumen merupakan proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan menghabiskan barang atau jasa. (Loudon dan Della-Bitta; 1984)
4. Perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa, disebut perilaku konsumen. (Winardi, 1991)

5. Perilaku yang dikaitkan dengan preferences dan possibilities adalah perilaku konsumen. (Deaton dan Muellbawer, 1986)
6. Perilaku konsumen merupakan pengkajian dari perilaku manusia sehari-hari (Mullen dan Johnson, 1990)

Dari beberapa pandangan di atas dapat ditarik satu kesimpulan yaitu Perilaku Konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi.

Alokasi PDB dewasa ini semakin besar digunakan untuk keperluan pembentukan modal atau investasi serta ekspor dan impor. Kenyataan ini tentu saja menggembirakan karena menandakan secara umum pendapatan masyarakat sudah mencukupi kebutuhan konsumsinya, sehingga terdapat kelebihan yang bisa ditabung untuk menjadi sumber dana investasi. Adalah beralasan untuk

menyatakan bahwa harapan untuk menumbuhkan perekonomian cukup prospektif. Persoalannya kemudian ialah seberapa besar tabungan masyarakat kita telah mencukupi sasaran pertumbuhan perekonomian yang diinginkan.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia rata-rata 6,5 persen per tahun selama dasawarsa 1970-an. Angka ini satu persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat Malaysia untuk kurun waktu yang sama. Akan tetapi, lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata tahunan pengeluaran konsumsi masyarakat India dan Republik Rakyat Cina, masing-masing 2,9 dan 4,9 persen; bahkan juga dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat Amerika Serikat (3,1%) dan Jepang (4,7%). Dalam periode 1980-1993, pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia tumbuh setingkat satu atau rata-rata 4,4 persen per tahun, lebih rendah daripada India (4,7%) dan Cina (7,9%) serta Malaysia (5,5%); namun lebih tinggi daripada Amerika dan Jepang. Angka-angka perbandingan ini

beralasan untuk menjelaskan bahwa, sebagai Negara berkembang, Indonesia memiliki bekal kemandirian yang cukup mantap dalam menumbuhkan perekonomiannya. Hasil-hasil pembangunannya selama ini teralokasikan ke penggunaan yang produktif.

Kemantapan bekal kemandirian dalam pembangunan tersebut apat dikonfirmasi melalui tinjauan pengeluaran konsumsi masyarakat berdasarkan proporsinya dalam pembentukan permintaan agregat (*aggregate demand*).

Proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat dalam membentuk permintaan agregat menyiratkan dua hal. Pertama, peran tabungan masyarakat terhadap pendapatan nasional semakin besar. Kedua, peran sector-sector penggunaan lain dalam membentuk permintaan agregat semakin besar, khususnya sector pembentukan modal atau investasi dan sector ekspor-impor.

Dalam perekonomian ada beberapa pendekatan yang mempelajari perilaku konsumen,

antara lain pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Penjelasan masing-masing sebagai berikut :

1. Pendekatan Tradisional

Menurut pendekatan ini, setiap barang mempunyai dayaguna atau utilitas, oleh karena barang tersebut pasti mempunyai kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang tersebut. Jadi bila orang meminta suatu jenis barang, pada dasarnya yang diminta adalah dayaguna barang tersebut.

2. Pendekatan Modern

Pendekatan ini menggunakan analisa regresi yang secara praktis digunakan untuk memperkirakan permintaan.

Dalam teori makro ekonomi dikenal berbagai variasi model fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yang paling dikenal dan sangat lazim digunakan dalam perhitungan-perhitungan makro ekonomi, yaitu fungsi konsumsi Keynesian. John Maynard Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi

masyarakat tergantung pada (berbanding lurus dengan) tingkat pendapatannya. James S. Duesenberry mengusulkan model lain. Berkaitan dengan hipotesisnya tentang pendapatan relative, ia berpendapat tingkat pendapatan yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat bukan tingkat pendapatan efektif, maksudnya pendapatan rutin yang secara factual diterima, tapi oleh tingkat pendapatan relative. Milton Friedman mengajukan model pendapatan yang menentukan besar kecilnya konsumsi adalah tingkat pendapatan permanen. Tentu saja, selain tingkat pendapatan sebagai variable pengaruh utama, terdapat kemungkinan beberapa variable lain turut mempengaruhi besar kecil pengeluaran konsumsi masyarakat. Dari sudut tinjauan kebaikan suai (*goodness of fit*) model ini cukup memadai.

B. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin

pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran lancar dan pos pengeluaran kapital. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang sifatnya menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Berikut ini adalah penjelasannya :

1. Pengeluaran Rutin Pemerintah

Pengeluaran rutin adalah segala bentuk pengeluaran pemerintah untuk membayar kebutuhan sehari-hari pemerintah. Pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan. Tujuan pengeluaran rutin agar pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan asset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian.

Besarnya pengeluaran rutin dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakanyang ditempuh

pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian, seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang, dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran.

Contoh pengeluaran rutin pemerintah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai, termasuk gaji pegawai negeri dan TNI
- b. Belanja barang, seperti perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Cicilan hutang, baik hutang luar dan dalam negeri
- d. Subsidi daerah otonom
- e. Pengeluaran rutin lainnya adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
- f. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan.

2. Pengeluaran Tidak Rutin Pemerintah

Pengeluaran pembangunan (pengeluaran tidak rutin) yaitu pengeluaran yang bersifat modal

masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pos pengeluaran pembangunan diantaranya untuk bantuan rupiah, seperti sumbangan bagi korban bencana alam dan bantuan biaya proyek untuk pembangunan sarana fasilitas umum. Besar kecilnya anggaran pengeluaran atau konsumsi pemerintah akan sangat bergantung pada sikap dan keputusan-keputusan politik.

Pada hakikatnya, tujuan konsumen melakukan kegiatan konsumsi, yaitu memenuhi segala kebutuhannya sehingga memperoleh kepuasan maksimal. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut manusia dihadapkan pada keterbatasan tertentu sehingga diperlukan tindakan atau perilaku konsumsi yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan tindakan konsumsi yang berprinsip ekonomi. Kegiatan mengkonsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan **perilaku konsumtif** masyarakat. Perilaku konsumtif adalah perilaku

manusia yang melakukan kegiatan konsumsi yang berlebihan.

Semua tindakan konsumsi didasarkan pada prinsip dan tindakan ekonomi. Artinya seorang konsumen dalam melakukan tindakan konsumsinya harus selalu bertindak rasional dan ekonomis, selalu membeli atau mengonsumsi barang yang benar-benar di butuhkan, membeli dan mengonsumsi barang dengan tujuan ideal, serta setiap tindakan konsumsinya selalu berdasarkan skala prioritas. Perilaku konsumtif ini bila dilihat dari sisi positif akan memberikan dampak:

1. Membuka dan menambah lapangan pekerjaan, karena akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah besar.
2. Meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan, karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam.

3. Menciptakan pasar bagi produsen, karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Mendorong produsen untuk memproduksi barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik.

Bila dilihat dari sisi negatifnya, maka perilaku konsumtif akan menimbulkan dampak:

1. Pola hidup yang boros dan akan menimbulkan kecemburuan sosial, karena orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga barang tersebut murah atau mahal, barang tersebut diperlukan atau tidak, sehingga bagi orang yang tidak mampu mereka tidak akan sanggup untuk mengikuti pola kehidupan yang seperti itu.
2. Mengurangi kesempatan untuk menabung, karena orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan untuk ditabung.

3. Cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang, orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa datang.
4. Mendorong konsumen melakukan pengeluaran di luar batas kemampuannya sehingga akan melakukan pinjaman yang pada akhirnya akan terjebak hutang.



BAB 10. PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Tujuan dari bab perdagangan luar negeri ini adalah agar mahasiswa memahami pengertian dan perdagangan luar negeri

A. Pendahuluan

Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri, kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi, masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Selain itu, permintaan akan sesuatu barang ditentukan oleh pendapatan kita dapat menduga bahwa ada hubungan antara pendapatan satu negara dengan pembelian barang luar negeri (impor). Jika pendapatan naik, maka pembelian barang-barang dan jasa (dari dalam Negeri maupun impor) dapat mengalami kenaikan ada 3 aspek dari peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian yaitu:

1. Keuntungan yang dapat di peroleh sesuatu Negara dari melakukan perdagangan luar negeri.
2. Kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri.
3. Mengenai globalisasi.

Berdagang dengan negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan, yakni dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual keluar negeri dengan harga yang relative lebih tinggi. Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya perbedaan harga barang di berbagai negara.

Perbedaan harga inilah yang menjadi pangkal timbulnya perdagangan antar negara. Dan perbedaan harga bukanlah hanya ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan ongkos produksi, tetapi juga karena perbedaan dalam pendapatan serta selera permintaan akan sesuatu barang sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Selera dapat memainkan peranan penting dalam menentukan permintaan akan sesuatu barang antara berbagai

negara. Apabila persediaan suatu barang di satu negara tidak cukup untuk memenuhi permintaan, negara tersebut dapat mengimpor dari negara lain.

Untuk suatu barang tertentu faktor selera dapat memegang peranan penting. Misalnya: mobil, rokok, pakaian, meskipun satu negara tertentu telah dapat menghasilkan barang-barang tersebut, namun kemungkinan besar impor dari negara lain dapat terjadi. Hal ini dikarenakan faktor selera, dimana penduduk negara tersebut lebih menyukai barang-barang buatan negara lain.

Berikut adalah pandangan para ahli ekonomi/mazhab di masa merkantilisme dan klasik mengenai sumbangan perdagangan luar negeri kepada masyarakat.

Ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab merkantilis yaitu ahli-ahli ekonomi yang hidup di sekitar abad keenam belas dan ketujuh belas, berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk sesuatu negara. Menurut mereka, suatu negara dapat mempertinggi

kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya keluar negeri.

Sesudah itu, ahli-ahli ekonomi klasik menganalisis dengan lebih mendalam lagi peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Misalnya, David Ricardo telah mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis untuk menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam mengembangkan suatu perekonomian. Teori Ricardo, yang menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan, merupakan teori yang hingga sekarang menjadi dasar kepada teori perdagangan luar negeri. Berdasarkan kepada teori Ricardo tersebut, negara – negara digalakkan menjalankan sistem perdagangan bebas/free trade. Yang dimaksudkan perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri dimana setiap Negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan.

B. Proteksi Dan Pembatasan Perdagangan

Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini, misalnya dapat dijalankan dengan tarif, kuota dan sebagainya. Proteksi bisa berbentuk:

a. Pengenaan Tarif

Pengertian tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu Negara. Tarif digolongkan menjadi:

1. Bea ekspor adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut manusia ke negara lain.
2. Bea transito adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain.
3. Bea impor adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam

custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

b. Quota

Pengertian Quota adalah pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang masuk (Quota impor) dan keluar (Quota ekspor).

c. Pelanggaran Impor

Seandainya suatu Negara melarang impor barang A, maka industri dalam negeri yang memproduksi atau merakit barang A akan memperoleh proteksi. Dalam hal ini proteksi bersifat mutlak bagi industri barang A dalam negeri.

d. Subsidi

Dengan adanya subsidi, produsen dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah, sehingga bisa bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan bisa dalam berbagai bentuk, misalnya:

1. Subsidi langsung berupa sejumlah uang tertentu
2. Subsidi per unit produksi.

C. Globalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Globalisasi adalah satu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa ini, tetapi yang menyatakan dan pembahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi diantara berbagai negara.

Untuk lebih memahami makna definisi perhatikan dua contoh saling ketergantungan dalam aspek ekonomi berikut: pertama, efek dari berlakunya kemunduran ekonomi di Amerika Serikat, Jepang dan Negara-negara Eropa, perkembangan investasi asing yang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini di Indonesia menimbulkan efek buruk kepada prospek perkembangan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi di negara – negara lain, seperti misalnya di negara – negara Asia Tenggara.

1. Faktor – Faktor yang Mewujudkan Globalisasi

- a. Perkembangan politik dunia

- b. Semakin pentingnya praktek pasar bebas
- c. Perkembangan perusahaan multinasional
- d. Berkembangnya investasi keuangan ke berbagai negara
- e. Kemajuan teknologi dalam bidang teknologi informasi dan pengangkutan

2. Keuntungan dan Kerugian Globalisasi

- a. Keuntungan Globalisasi
 - 1) Produksi dunia dapat ditingkatkan
 - 2) Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara
 - 3) Meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri
 - 4) Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik
 - 5) Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi
- b. Kerugian Globalisasi
 - 2) Menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur

- 3) Memperburuk keadaan neraca pembayaran
- 4) Sektor keuangan semakin tidak stabil
- 5) Memperbudak prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



BAB 11. NERACA PEMBAYARAN, ARUS MODAL ASING, DAN UTANG LUAR NEGERI

Tujuan dari bab neraca pembayaran, arus modal asing, dan utang luar negeri ini adalah agar mahasiswa memahami pengertian dan proses neraca pembayaran, arus modal asing, dan utang luar negeri

A. Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan (yang terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa dan transfer payment) dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Transaksi dalam neraca pembayaran dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu:

- a. **Transaksi debit**, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa)

dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.

- b. **Transaksi kredit** adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

B. Arus Modal Masuk

Pengertian Penanaman Modal Asing dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini menurut pasal 2 adalah :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer

ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Sehubungan dengan arus modal, dapat kiranya dipahami bahwa untuk melakukan transaksi perdagangan barang internasional di satu pihak tertentu diperlukan modal internasional dan di lain pihak transaksi tersebut menghasilkan keuntungan yang akhirnya akan terakumulasi menjadi modal baru yang akan di investasikan lagi untuk meningkatkan keuntungan. Secara umum arus modal asing dapat bersifat hal berikut : (Hady, 2001:92-93)

a. *Portofolio Investment*, yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial, seperti saham (stock), obligasi (bond), dan commercial papers. Arus portofolio inilah yang saat ini paling banyak dan cepat mengalir ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional, seperti New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hongkong, Singapura.

b. *Direct Investment*, yaitu investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Direct investment ini biasanya dimulai dengan pendirian subsidiary atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan. Dalam konteks internasional, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional (MNC) dengan operasi di bidang manufaktur, industri pengolahan, ekstraksi sumber alam, industri jasa, dan sebagainya.

Pada umumnya faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya aliran modal, skill dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang, pada dasarnya dipengaruhi oleh lima faktor-faktor utama. Adapun faktor-faktor yang dimaksud, yaitu:

- a. Adanya iklim penanaman modal dinegara-negara penerima modal itu sendiri yang mendukung keamanan berusaha (*risk country*), yang

- ditunjukkan oleh stabilitas politik serta tingkat perkembangan ekonomi dinegara penerima modal.
- b. Prospek perkembangan usaha di negara penerima modal.
 - c. Tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan.
 - d. Tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah serta potensi pasar dalam negara penerima modal.
 - e. Aliran modal pada umumnya cenderung mengalir kepada negara-negara yang tingkat pendapatan nasionalnya per kapita relatif tinggi.

Secara umum dapat dikatakan terdapat hubungan ketidakseimbangan antara negara maju sebagai pembawa modal dengan negara berkembang sebagai penerima modal. Hubungan tidak seimbang tersebut disebabkan oleh beberapa hal utama (Streeten, 1980 : 251), yaitu:

- a. Pemodal asing selalu mencari keuntungan (profit oriented), sedangkan negara penerima modal

mengharapkan bahwa modal asing tersebut dapat membantu tujuan pembangunan ekonomi nasional atau sebagai pelengkap dana pembangunan.

- b. Pemodal asing memiliki posisi yang lebih kuat, sehingga mereka mempunyai kemampuan berusaha dan kemampuan berunding yang lebih baik.
- c. Pemodal asing biasanya memiliki jaringan usaha yang kuat dan luas, yaitu dalam bentuk Multinational Corporation. Perusahaan ini pada dasarnya lebih mengutamakan melayani kepentingan negara dan pemilik saham di negara asal daripada kepentingan negara penerima modal.

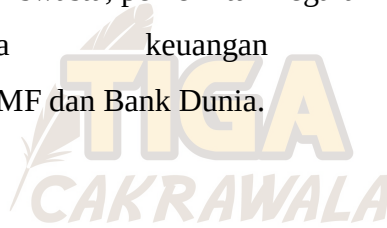
Tentunya ketidakseimbangan tersebut menjadi tantangan bagi negara-negara penerima modal asing termasuk Indonesia, yaitu bagaimana mengatasi ketidakseimbangan yang dimaksud dalam rangka usaha menarik investor asing. Dalam menghadapi tantangan yang dimaksud negara penerima modal asing pada umumnya dan Indonesia

khususnya harus dapat mengupayakan melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Dapat mengakomodasi motif profit oriented dari pemodal asing dengan sebaik-baiknya, sehingga filosofi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang PMA yang mengatakan bahwa masuknya modal asing hanyalah bersifat pelengkap dana pembangunan tidak menjadi suatu kendala yang menghambat arus masuknya investasi modal asing tersebut.
- b. Mengupayakan agar hubungan antara pemodal asing dengan penerima modal tetap diarahkan pada kemitraan yang dapat saling membangun, sehingga sumber luar negeri dari pinjaman luar negeri tetap dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi secara optimal.
- c. Negara penerima modal harus dapat mengembangkan potensi ekonominya secara akurat, serta mampu menjaring informasi mengenai kegiatan usaha penanaman modal dalam rangka peningkatan kemampuan dan posisi

bargaining-nya dalam menghadapi pemilik modal asing.

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.



BAB 12. LITERASI DIGITAL

Literasi digital diperlukan untuk membangun kembali perekonomian yang lebih mapan pascapandemi COVID-19. Literasi digital, juga dikenal sebagai literasi digital, adalah metode pencarian, penciptaan, dan evaluasi informasi yang cerdas, arif, sehat, akurat, akurat, patuh serta taat pada hukum melalui digital media, komunikasi media, dan jaringan. Untuk memajukan interaksi dan komunikasi pada kehidupan keseharian Kemdikbud, (2017). Perkembangan era digital yang semakin pesat mendorong kita untuk cepat beradaptasi. Khususnya bagi wirausaha kemampuan digital ini akan memberikan manfaat untuk oerkembangan bisnisnya. Saat ini bisnis secara online baik melalui e-commerce ataupun media sosial lainnya menawarkan kemudahan bagi siapa saja yang ingin berwirausaha, literasi digital akan dapat mempermudah upaya wirausaha Wanita untuk lebih optimal mengelola bisnisnya

Menurut Hasibuan (2021b) Literasi keuangan

yang buruk telah menemukan bahwa itu mengarah pada perencanaan keuangan yang tidak akurat dan mendistorsi pencapaian kesejahteraan ketika hari tua tidak lagi produktif. Pengusaha wanita tentunya mempunyai tingkatan perbedaan literasi keuangan. Mereka yang mempunyai literasi keuangan akan lebih fokus dan jernih untuk mencapai kekayaan. Setyanuraha, (2020) perusahaan yang keuangannya dikelola dan dilaporkan secara transparan dan akurat akan memiliki dampak baik untuk kemajuan dari perusahaan tersebut. Wirausaha wanita yang mempunyai tingkatan digital literasi dan keuangan literasi, akan sangat mudah beradaptasi serta lebih maksimal dalam pengelolaan bisnis online mereka. Dengan demikian maka wirausaha Wanita memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di keluarganya dan sekaligus akan membantu pertumbuhan ekonomi di daerahnya Amelia et al., (2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih, (2021), hanya membahas mengenai penguatan literasi digital dengan menggunakan pemanfaatan e-

learning, sehingga masih dibutuhkan variabel lain dalam penelitian lanjutan. Kemudian perbedaan dengan penelitian ini adalah, mengacu penelitian yang dilakkan oleh Setyaningsih, (2021), maka penelitian ini menambahkan variabel literasi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga merupakan Kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan perekonomian sampai 35% dalam 1 tahun yaitu pada tahun 2020. Hal ini yang mengakibatkan *income* pendapatan masyarakat purbalingga menurun. Dari permasalahan tersebut, dapat diatasi dengan bagaimana penggunaan literasi digital dalam perekonomian jual beli dan literasi keuangan untuk dapat membuat pos-pos keuangan agar sesuai dengan kebutuhan.

Akibat Covid-19 tentu sangat sulit bagi usaha kecil, bahkan jika tergolong kondisi yang tidak biasanya ini akan sulit diprediksi. Sangat memperburuk keadaan serta kondisi UMKM saat ini

untuk harus bertahan menghadapi tantangan bisnis Covid-19 Sarman Simanjorang (2020), sangat ironis. Selain banyak insentif pemerintah yang perlu diakui, upaya strategis untuk meningkatkan kinerja pengusaha perempuan dan keberlanjutan perusahaan selama periode yang tidak pasti ini juga diperlukan. Literasi digital dan literasi keuangan merupakan beberapa inisiatif strategis yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Pulbaringa. Hasibuan, (2021a). Mengukur dan mengidentifikasi tingkat keuangan literasi dan digital literasi wirausaha wanita pada pergerakan online bisnis pada perkembangan perekonomian di daerah terutama Kabupaten Purbalingga adalah tujuan dari penelitian ini Rahmadi, (2018).

Menurut Sedán et al., (2020) digital literasi mengklaim untuk kemampuan secara efektif serta efisien dalam penggunaan teknologi informasi pada perangkat digital dalam berbagai situasi, termasuk belajar, bekerja, dan kehidupan sehari-hari. Digital literasi dalam tema ini adalah upaya untuk mengevaluasi, mengintegrasikan dan memahami,

berbagai bentuk informasi pada pengiriman komputer. Rosmita Rasyid, (2022). Mereka cenderung menutup diri karena tingkat ketakutan menggunakan *computer anxiety* yang menyebabkan pada seseorang menjadi kurang percaya diri dan ingin menerima atau memahami penggunaan perangkat komputasi. Hal tersebut juga mempengaruhi hasil daya rendah Priambodo et al., (2021).

Di ekonomi modern, penggunaan aplikasi perangkat lunak melalui perangkat digital pribadi, seperti smartphone dan tablet, untuk mengakses layanan dan produk keuangan, yang disebut fintech, telah menawarkan peluang investasi baru serta risiko bagi investor individu yang secara langsung mengendalikan investasi mereka. keuangan pribadi. Makalah ini dimotivasi oleh gagasan bahwa orang membutuhkan literasi digital - kecakapan dalam penggunaan platform dan digital aplikasi - dan keuangan literasi - kemampuan dalam pemahaman dasar-dasar ekonomi serta keuangan dalam mengambil keputusan keuangan pribadi - untuk

berbagi manfaat digitalisasi perbankan dan pasar keuangan Sedán et al., (2020).

Menurut Quoquab et al., (2016) menyatakan bahwa literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan keuangan yang harus dapat digunakan seseorang untuk mengelola sejumlah uang dan meningkatkan standar hidup mereka. Literasi keuangan terkait erat dengan dampak perilaku kebiasaan dan faktor eksternal yang merupakan elemen kunci dari literasi layanan keuangan individu, membandingkan produk dan layanan keuangan, serta membuat keputusan keuangan yang terinformasi dan bijaksana Ong et al., (2016). Pengetahuan dasar mencakup konsep keuangan dan kemampuan untuk menerapkan kekuatan komputasi dalam konteks keuangan untuk memungkinkan konsumen mengelola masalah keuangan mereka secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, ialah:

- a. Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)
OECD menyatakan literasi keuangan ialah elemen utama dari keuangan literasi individu

dan membantu dalam membandingkan suatu produk serta layanan keuangan dalam pembuatan keputusan keuangan agar terinformasi serta bijaksana. Dasar pengetahuan mencakup keuangan dari konsep dan upaya dalam penerapan kekuatan komputasi untuk konteks keuangan untuk memungkinkan masyarakat mengelola suatu problem keuangannya secara mandiri yang berguna peningkatan kesejahteraannya. Ketika semua praktik ini ditelaah, terlihat bahwa pendidikan dan keterampilan literasi keuangan sudah mulai mendapat perhatian di seluruh dunia. Dalam konteks ini, pelajaran literasi keuangan yang dibutuhkan oleh semua kelompok umur dicoba untuk dimasukkan dalam pendidikan formal guna meningkatkan tingkat literasi keuangan anak mulai dari usia dini Ong et al., (2016).

b. Perilaku Keuangan (*Financial Behaviour*)

OECD menyatakan bahwa perilaku dan perilaku konsumen, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pada akhirnya membentuk posisi

keuangan dan kesejahteraan mereka. Menunda pembayaran tagihan perilaku tertentu, tidak merencanakan biaya masa yang akan datang, atau pemilihan produk dari keuangan tanpa adanya pengeluaran dapat berakibat buruk untuk kondisi kesejahteraan dan keuangan seseorang Shetty et al., (2021).

c. Sikap Keuangan (*Financial Attitude*)

INFE / OECD menyadari meskipun masyarakat mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup bagi tindakan sebagai suatu sikap, cara tertentu akan memengaruhi sebuah tindakan dalam mengambil keputusan. Kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan kesadaran diperlukan dalam mengambil keputusan keuangan yang sesuai serta pada akhirnya untuk mencapai dari kesejahteraan finansial mandiri Wilson et al., (2019).

Hubungan antara Penggunaan Literasi Digital terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah

Pernyataan pada dugaan sementara atau hipotesis yang pertama memperlihatkan literasi digital memiliki efek positif pada peningkatan ekonomi lokal telah menunjukkan hasil yang sesuai. Hasil tersebut diperlihatkan melalui signifikansi (nilai P) dengan hasil 0,000 yang kurang dari 0,05 serta regresi koefisien dengan nilai 0,722 yang artinya adalah literasi keuangan memiliki proporsi sebesar 72% terhadap peningkatan ekonomi daerah. Perbedaan cara menggunakan literasi digital berbeda. Hal ini membuat perbedaan yang signifikan antara individu dalam proses akuisisi data, baik jangka pendek dan jangka panjang, dan meningkatkan ekonomi lokal. Huston (2010) menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti kebiasaan, kognisi, ekonomi, keluarga, teman sebaya, komunitas, dan institusi dapat mempengaruhi perilaku ekonomi.

Amelia et al., (2022) menjelaskan bahwa tingkat *literasi digital* seseorang dipengaruhi oleh: karakteristik demografi (gender, etnis, pendidikan dan kemampuan kognitif), latar belakang keluarga,

kekayaan, serta preferensi waktu sehingga dalam hal ini yang akan mempengaruhi dari peningkatan ekonomi suatu daerah. Hasibuan, (2021a) menjelaskan bahwa faktor personal (intelegensi dan kemampuan kognitif), sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi *literasi digital*.

Dalam penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huston (2010) dan Amelia et al., (2022) yang bersama-sama menyebutkan adanya hubungan literasi digital terhadap peningkatan ekonomi daerah, namun hanya perbedaannya adalah pada subjek dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun hal tersebut memperkuat dari temuan ini.

Hubungan antara Literasi Keuangan terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah

Pernyataan pada dugaan sementara atau hipotesis yang kedua memperlihatkan bahwa penggunaan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi lokal telah menunjukkan hasil yang sesuai. Hasil tersebut

diperlihatkan melalui signifikansi (nilai P) dengan hasil 0,000 yang kurang dari 0,05 serta regresi koefisien dengan nilai 0,292 yang artinya adalah literasi keuangan memiliki proporsi sebesar 29% terhadap peningkatan ekonomi daerah. Kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan keuangan memiliki efek penting dan positif pada peningkatan ekonomi lokal.

Ketika semua praktik ini ditelaah, terlihat bahwa pendidikan dan keterampilan literasi keuangan sudah mulai mendapat perhatian di seluruh dunia. Dalam konteks ini, pelajaran literasi keuangan yang dibutuhkan oleh semua kelompok umur dicoba untuk dimasukkan dalam pendidikan formal guna meningkatkan tingkat literasi keuangan anak mulai dari usia dini Ong et al., (2016). Literasi keuangan memiliki peran penting dalam peningkatan peningkatan ekonomi daerah yaitu upaya peningkatan secara efisiensi baik pada efisiensi ataupun operasional untuk dinikmati masyarakat Amelia et al., (2022).

Dalam penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ong et al., (2016) dan Amelia et al., (2022) yang bersama-sama menyebutkan adanya hubungan literasi keuangan terhadap peningkatan ekonomi daerah, namun hanya perbedaannya adalah pada subjek dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun hal tersebut memperkuat dari temuan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Basri, F. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Basuki, A. T., & Nano P. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, M. D. K, & Setiawina, N. D. (2015). *Pengaruh Kurs Dollar, Harga, dan Inflasi terhadap Volume Ekspor Kepiting Indonesia*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4 No. 7
- Elisha, L. C. (2015). *Analisis Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika Serikat dengan Pendekatan Error Correction Model*. EDAJ Vol. 4 No. 4
- Fernando, Yosep. (2009). *Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Jagung Indonesia di Pasar Malaysia Pra dan Pasca Krisi Ekonomi*. Skripsi. Bogor. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Food and Agricultural Organization. (2018). *Production/Yield Quantities of Maize in Indonesia*. FAOSTAT.

- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso, T. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herlambang. (2001). *Ekonomi Makro: Teori Analisis dan Kebijakan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Juliantari, D. P. E., & Setiawina, N. D. (2015). *Analisis Pengaruh Kurs Dollar Amerika Serikat, Inflasi, dan Penanaman Modal Asing terhadap Nilai Ekspor Makanan dan Minuman di Indonesia*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4 No. 12.

GLOSARIUM

Akumulasi modal adalah proses penambahan persediaan modal dalam upaya meningkatkan total output

Depresi ekonomi adalah resesi ekonomi yang berlangsung lama

Dualisme ekonomi adalah dua sistem ekonomi yang berbeda dan berdampingan sama kuat

Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara

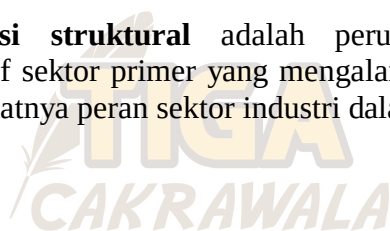
Pengangguran semu adalah angkatan kerja yang bekerja namun tidak produktif

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu

Produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat

Transformasi struktural adalah perubahan peran pangsa relatif sektor primer yang mengalami penurunan dan meningkatnya peran sektor industri dalam ekonomi



TENTANG PENULIS



Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd. Lahir di Malang, pada tanggal 1 Juli 1989, Pendidikan Dasar dan Menengah diperoleh dari SD Tamansiswa Turen-Malang lulus 2001, SMP Negeri 1 Turen-Malang lulus 2004 dan SMA Negeri 1 Turen-Malang lulus 2007. Pendidikan Tinggi yang ditempuhnya pada awal masuk tahun 2007 adalah Sarjana Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang, lulus pada tahun 2011. Melanjutkan studi S2 tahun 2011 pada Magister Pendidikan Ekonomi Pascasarjana Universitas Negeri Malang, lulus pada tahun 2013. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Akuntansi di Universitas Perwira Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Penulis bisa dihubungi melalui email shellarizqiamelia@gmail.com

TENTANG PENULIS



Aning Fitriana, S.E., M.Ak.

Lahir di Banjarnegara, pada tanggal 07 April 1992. Pendidikan SMA 1 Purwareja Klampok (2010). Pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Sebelas Maret (UNS) lulus tahun 2015 dan melanjutkan studi Program Magister Akuntansi di Universitas Sebelas Maret

(UNS) lulus tahun 2018 pada konsentrasi akuntansi keuangan. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Program studi Akuntansi di Universitas Perwira Purbalingga Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2019. Penulis bisa dihubungi melalui email aningfv@gmail.com atau WA 082225201518

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas mengenai Perekonomian Indonesia sebagai bahan ajar mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada buku ini akan dibahas lebih lengkap terkait bagaimana sejarah dan perkembangan perekonomian Indonesia dalam perkuliahan yang ada saat ini dengan menyesuaikan kurikulum yang ada saat ini.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ciri-ciri spesifik, yang berbeda dengan negara-negara lain di dunia, sehingga perekonomiannya tentu saja memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda pula dengan negara-negara lain. Karakteristik menunjukkan ciri yang mendasari dari sebuah objek. Adapun karakteristik perekonomian Indonesia, dipengaruhi oleh: 1) Faktor Geografi, 2) Faktor Demografi, 3) Faktor Sosial, Budaya dan Politik.

Buku ini juga menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang literasi digital pada UMKM yang akan mempermudah sektor UMKM untuk mempermudah dalam pelaksanaan penjualan

BUKU AJAR

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dilengkapi Dengan Hasil Penelitian Literasi Digital

Buku ini membahas mengenai Perekonomian Indonesia sebagai bahan ajar mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada buku ini akan dibahas lebih lengkap terkait bagaimana sejarah dan perkembangan perekonomian Indonesia dalam perkuliahan yang ada saat ini dengan menyesuaikan kurikulum yang ada saat ini.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ciri-ciri spesifik, yang berbeda dengan negara-negara lain di dunia, sehingga perekonomiannya tentu saja memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda pula dengan negara-negara lain. Karakteristik menunjukkan ciri yang mendasari dari sebuah objek. Adapun karakteristik perekonomian Indonesia, dipengaruhi oleh: 1) Faktor Geografi, 2) Faktor Demografi, 3) Faktor Sosial, Budaya dan Politik.

Buku ini juga menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang literasi digital pada UMKM yang akan mempermudah sektor UMKM untuk mempermudah dalam pelaksanaan penjualan

Penerbit Tiga Cakrawala



ISBN 978-623-8187-00-3



9 786238 187003